



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**INDIKASI EARNING MANAGEMENT TERHADAP PENURUNAN
TARIF PPH WAJIB PAJAK BADAN DALAM REFORMASI PAJAK
2008 DENGAN MENGGUNAKAN METODE DISCRETIONARY
ACCRUAL (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YANG TERDAFTAR DI BEI)**

SKRIPSI



**IIN SAPUTRA
07153094**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi skripsi yang saya tulis dengan judul: **Indikasi *Earning Management* Terhadap Penurunan Tarif PPh Wajib Pajak Badan Dalam Reformasi Perpajakan 2008 dengan Menggunakan Metode *Discretionary Accrual* (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)** adalah hasil kerja/karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan dalam skripsi ini. Jika kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Padang, 1 Agustus 2012
Yang membuat pernyataan



IIN SAPUTRA
BP: 07153094



**Indikasi Earning Management Terhadap Penurunan Tarif PPh Wajib Pajak
Badan Dalam Reformasi Perpajakan 2008 dengan Menggunakan Metode
Discretionary Accrual (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang
Terdaftar di BEI)**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI melakukan manajemen laba dengan rekayasa *discretionary accrual* sebagai respon terhadap penurunan tarif wajib pajak badan sesuai dengan UU No.36 tahun 2008. Metode penelitian menggunakan data sekunder yang didapat dari media perantara yang bisa didapatkan berbagai situs yang mempublikasikan data terkait. Hasil analisis data yang didapat memberikan bukti empiris bahwa perusahaan melakukan manajemen laba melalui rekayasa akrual sebagai respon terhadap penurunan tarif wajib pajak badan menjadi tarif tunggal 28 persen. Sedangkan pada penurunan tarif menjadi 25 persen perusahaan tidak melakukan manajemen laba melalui rekayasa akrual.

Kata kunci : Manajemen Laba, Reformasi Pajak, Rekayasa Akrual



**Management Earning Indications to Income Tax Rates Decrease of
Corporate Taxpayers in the Tax Reform 2008 Using Discretionary Accrual
Method (Empirical Study of Manufacturing Companies Listed on the Stock
Exchange)**

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine whether a manufacturing company listed on the Stock Exchange to earnings management with discretionary accrual in response to the decline in corporate tax rates shall be in accordance with Law No.36 of 2008. Methods of research using secondary data obtained from its medium which can be found various sites that publish relevant data. The analysis of data obtained provide empirical evidence that firms do accrual earnings management through discretionary accrual as a response to the decline in corporate tax rates must be a single rate of 28 percent. While the reduction in tariffs to 25 percent of companies do not do accrual earnings management through discretionary accrual.

Keywords: Earnings Management, Tax Reform, Discretionary Accrual



KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Indikasi Earning Management terhadap Penurunan Tarif PPh Wajib Pajak Badan dalam Reformasi Perpajakan 2008 (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)”. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima dukungan, bimbingan, bantuan, serta pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Orang tua tercinta (Zunimar dan Alm. Wirman), untuk ibunda yang sangat saya sayangi yang telah begitu besar memberikan dukungan untuk tetap semangat kepada penulis, terkhusus buat ayahanda tercinta yang telah beristirahat dengan damai di alam sana, doa anak yang sholeh dari penulis selalu menyertaimu.
2. Uda uni tersayang Ricky Wahyudi, Liza Lestari, Desi Susanti yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan kepada penulis baik moril maupun materil. Semoga kita tetap menjadi anak yang sholeh yang selalu membanggakan orang tua.

3. Bapak Firdaus, SE. M.Si. Ak sebagai pembimbing skripsi, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam bentuk ilmu maupun wejangan-wejangan yang sangat berguna bagi penulis untuk kelancaran dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
5. Bapak Dr. H. Yuskar, SE. MA. Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
6. Bapak Drs. Riwayadi, MBA. Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
7. Bapak Drs. Amsal Djunid, M.Bus. Ak sebagai pembimbing akademik penulis.
8. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, khususnya Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan berharga bagi penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis "sanasib-saraso", Rahmad Andika a.k.a Bones, Taf Rupiah, Frisky Here, Ryan Hidayana a.k.a Adek, Hani DP, Ikhsan a.k.a Dudut, Yudhi Hariyadi, Capaik Alfonso, Ibnu Hadi, Sosok bijak Aulia, Adly, Reynaldi, Pinto, Dicky, Feby Arief, Monday, Robby, Bayu, ijal dangdut mania, Paklek Korea Mania, Ardy Procoh, Angga, Elnanda, bicenk, Kelly, Ilen, Puput, Levi, Veni, Anda, Pipit, Aci, Ica, Caiye, Yeni, Pipi, Rere, Diah, Nadia, Binyok, Gita, Allev, Winda, Rika, cerita itu akan tetap penulis kenang dalam kehidupan penulis, terima kasih banyak atas dukungan dari sahabat semua dan tetap menjadi sahabat-sahabat sejati bagi penulis sampai kapanpun, sukses untuk kita semua.

10. Teman-teman 2007, Adam, raymon, ipang, Alta, Teddy dan teman-teman 2007 lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas do'a dan dukungan teman-teman semua, "HIDUP AKUNTANSI 2007".
11. Uda-uda yang telah sangat membantu penulis, da bob, da bobo, bang pane, bang nanda, bang syukri, bang vindi, bang jek, bang deo, bang angin (partner kompre), yang telah menjadi inspirasi tersendiri bagi penulis.
12. Uda-uda 2006, uda-uda 2005, uda-uda 2004, uda-uda 2003, uda-uda 2002, uda-uda 2001, uda-uda 2000 dan uda-uda lainnya yang telah mengajari penulis untuk kuliah dan bergaul di Keluarga Besar Akuntansi.
13. Adik-adik yang penulis banggakan, Ajo, Risky Lei Min Ho, Jeka, Riskun, Surip, Windy, tampek malapeh panek.
14. Adik-adik 2008, adik-adik 2009 dan adik-adik lainnya di Rumah Gadang Keluarga Besar Akuntansi.
15. Sahabat-sahabat SMS penulis Ruddy, Barry, Ceper, Pitang, Happy, Komeng, Titin, Mega, dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas cerita canda tawanya, sukses untuk sahabat-sahabat semi
16. Pihak Biro Jurusan Akuntansi, Mama Loly, Ni Eva, dan Da Ri yang telah banyak membantu dalam kelancaran urusan administrasi penulis.
17. Dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis dengan terbuka menyambut setiap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan di

masa depan yang berguna bagi semua bidang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Padang, 5 Agustus 2012



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK

	<i>Halaman</i>
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	10
2.1.2 Manajemen Laba.....	11
2.1.3 Motivasi <i>Earning Management</i>	15

2.1.4 Pengertian Akrua.....	16
2.1.5 Pengukuran Manajemen Laba dengan Pendekatan <i>Discretionary Accrual</i>	18
2.1.6 Pengertian Laba (<i>Income</i>)	23
2.1.7 Perubahan Tarif PPh Badan Menurut UU Perpajakan di Indonesia	24
2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis ...	33
2.4 Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 dan Manajemen Laba	33

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	37
3.1.1 Variabel Penelitian	37
3.1.2 Definisi Operasional.....	37
3.2 Penentuan Populasi dan Sampel.....	40
3.3 Jenis dan Sumber Data	41
3.4 Metode Pengumpulan Data	41
3.5 Metode Analisis Data	42
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif	42
3.5.2 Uji Multikolinearitas	42

3.5.3 Analisis Regresi Berganda	43
3.5.4 Uji Normalitas	43
3.5.5 Uji Beda T-Test.....	44

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	45
4.2 Hasil Analisis Data	46
4.2.1 Hasil Statistik Deskriptif.....	46
4.2.2 Hasil Uji Normalitas.....	47
4.2.3 Uji Hipotesis.....	48
4.2.3.1 Periode Sebelum Penurunan Tarif 28 Persen pada Tahun 2008.....	48
4.2.3.2 Periode Sesudah Penurunan Tarif 28 Persen atau Sebelum Penurunan Tarif 25 Persen pada Tahun 2009	51
4.2.3.3 Periode Sesudah Penurunan Tarif 25 Persen pada Tahun 2010.....	53
4.2.4 Uji Beda <i>T-Test Discretionary Accrual</i>	56
4.2.4.1 Perbedaan <i>Discretionary Accrual</i> Tahun 2008 dengan Tahun 2009.....	56
4.2.4.2 Perbedaan <i>Discretionary Accrual</i> Tahun 2009 dengan Tahun 2010.....	57

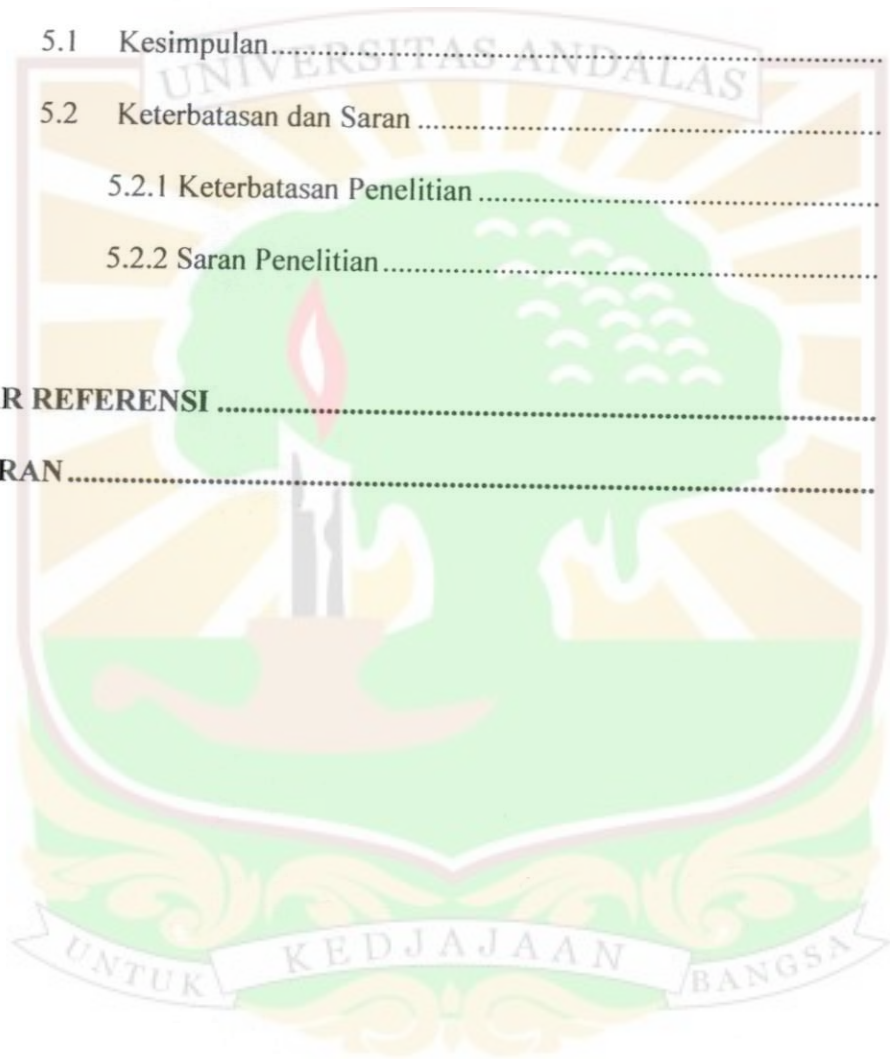
4.3	Pembahasan	59
4.3.1	Penurunan Tarif PPh Badan Menjadi 28%.....	59
4.3.2	Penurunan Tarif PPh Badan Menjadi 25%.....	61

BAB V : PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	64
5.2	Keterbatasan dan Saran	65
5.2.1	Keterbatasan Penelitian	65
5.2.2	Saran Penelitian	66

DAFTAR REFERENSI	vii
-------------------------------	------------

LAMPIRAN	67
-----------------------	-----------



DAFTAR TABEL

TABEL	<i>Halaman</i>
2.1 Perbedaan Tarif UU PPh Badan 1983, 1994, 2000, dan 2008.....	27
2.2 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu.....	30
4.1 Jumlah Sampel Penelitian.....	45
4.2 <i>Descriptive Statistic</i>	46
4.3 Hasil Uji Normalitas.....	48
4.4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	49
4.5 Estimasi <i>Non-Discretionary accrual</i> dengan Model Jones yang Dimodifikasi dengan Variabel Kontrol CFO.....	50
4.6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	52
4.7 Estimasi <i>Non-Discretionary accrual</i> dengan Model Jones yang Dimodifikasi dengan Variabel Kontrol CFO.....	52
4.8 Hasil Uji Multikolinearitas.....	54
4.9 Estimasi <i>Non-Discretionary accrual</i> dengan Model Jones yang Dimodifikasi dengan Variabel Kontrol CFO.....	55
4.10 Hasil Uji Beda Rata-Rata <i>Discretionary Accrual</i>	57
4.11 Hasil Uji Beda Rata-Rata <i>Discretionary Accrual</i>	58

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

Halaman

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	33
--------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Rincian Data Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2008
2. Rincian Data Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2009
3. Rincian Data Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2010
4. Perhitungan *Discretionary Accrual* Tahun 2008
5. Perhitungan *Discretionary Accrual* Tahun 2009
6. Perhitungan *Discretionary Accrual* Tahun 2010
7. Hasil Pengujian SPSS Analisis Deskriptif
8. Hasil Pengujian SPSS Uji Multikolinearitas
9. Hasil Pengujian SPSS Analisis Regresi Berganda
10. Hasil Pengujian SPSS Uji Kolmogorov-Smirnov
11. Hasil Pengujian SPSS Uji Beda



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Tugas mulia administrasi perpajakan, terutama administrasi pajak pusat, diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan. Dengan visi menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan salah satu misinya, yaitu misi fiskal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun 2008 bersama Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah telah merevisi beberapa undang-undang perpajakan sebagai salah satu bentuk Reformasi Perpajakan. Revisi tersebut meliputi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), serta Undang-Undang

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM) (Nasution, 2009). Reformasi Pajak Penghasilan tahun 2008, merupakan reformasi keempat atas UU No.7 Tahun 1983, UU No. 10 Tahun 1994, UU No.17 Tahun 2000 dan sekarang dalam UU No.36 tahun 2008. Reformasi ini diatur berdasarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2007 dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008. Secara garis besar, reformasi di bidang perpajakan bertujuan untuk (1) optimalisasi penerimaan yang berkeadilan, meliputi perluasan *tax base* dan stimulus fiskal; (2) meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui layanan prima dan penegakan hukum secara konsisten; (3) efisiensi administrasi berupa penerapan sistem dan administrasi handal dan pemanfaatan teknologi tepat guna; (4) terbentuknya citra yang baik dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, melalui kapasitas SDM yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, serta pelaksanaan *good governance* (Abimanyu, 2009).

Sementara Peraturan Pemerintah mempertimbangkan reformasi perpajakan dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global yang sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil. Selain itu, juga masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU No.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No.7 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Untuk mencapai misi pemerintah tersebut, maka melalui UU No.36 tentang Pajak Penghasilan tahun 2008 pemerintah memberi insentif dan kemudahan kepada pengusaha. Hal ini dapat mendorong para pengusaha untuk bersaing lebih kompetitif. Insentif dimaksud adalah : dengan menurunkan tarif pajak penghasilan yang dikenai tarif 28% mulai berlaku pada tahun fiskal 2009 dan akan menjadi 25% mulai berlaku pada tahun fiskal 2010. Tarif PPh ini masih dapat dikurangi lagi sebesar 5% apabila Wajib Pajak Badan tersebut merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak.

Sebelumnya dalam UU No.17 tahun 2000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) dimana tarifnya dibagi dalam tiga lapisan yaitu PKP s/d lima puluh juta rupiah sebesar 10%, PKP dari lima puluh juta sampai dengan seratus juta sebesar 15%, dan PKP diatas seratus juta sebesar 30%. Pada perusahaan yang terkena tarif 30% dan 35% akan mengalami penurunan tarif pajak pada tahun 2008. Dengan adanya pemberian insentif penurunan tarif pajak badan seperti yang dijelaskan di atas maka jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan mengalami penurunan, tetapi dengan penurunan tersebut apakah akan membawa dampak bagi perusahaan untuk tidak melakukan manajemen laba? Hal ini dapat dikaji lebih lanjut karena pada dasarnya semua perusahaan mengharapkan keuntungan yang optimal dan laporan keuangannya terlihat bagus.

Salah satu upaya yang dilakukan manajemen untuk memperoleh laba dari adanya perubahan tarif pajak badan ini adalah *tax shifting* yaitu dengan

memindahkan pendapatan tahun sebelum perubahan tarif pajak badan ke tahun sesudah perubahan tarif pajak. Hal ini menjadi peluang manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan *discretionary accrual*. Perilaku ini menjadi peluang bagi manajemen dalam melakukan metode opportunistik. Jika manajer memandang momen penurunan tarif pajak sebagai kesempatan untuk meminimalkan pajak, mestinya perusahaan akan menunda pengakuan pendapatan atau mempercepat pengakuan biaya pada tahun sebelum perubahan sehingga laba pada tahun tersebut menjadi rendah. Dengan cara ini perusahaan akan mendapatkan keuntungan sebesar penurunan tarif pajak kali besarnya pendapatan yang ditunda. Secara akuntansi hal ini dapat diterima karena menganut prinsip *accrual basis* yaitu pengakuan beban dan pendapatan pada periode dimana seharusnya terjadi atau yang dikenal dengan istilah *matching concept* (membandingkan beban dengan pendapatan), (Wulandari dkk, 2004).

Dalam akuntansi dikenal istilah basis akrual (*accrual basis*) dan basis kas (*cash basis*). Basis akrual digunakan untuk pengakuan pendapatan (*revenue*) pada saat diperoleh dan pengakuan beban yang sepadan dengan pendapatan periode yang sama, tanpa memperhatikan waktu penerimaan/pengeluaran kas dari pendapatan/beban yang bersangkutan. Sedangkan istilah basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan dan beban atas dasar kas tunai yang diterima/dikeluarkan. Konsep basis akrual inilah yang memberikan kebebasan (*discretion*) bagi manajer untuk merekayasa laba dan melakukan *earnings management* (Siti Munfiah, 2003). *Income taxation* dapat memberikan motivasi manajemen untuk melakukan rekayasa laba atau *earnings management*. Namun demikian pihak fiskus mempunyai aturan sendiri dalam mengatur pembukuan atau

akuntansi untuk penghasilan kena pajak (*taxable income*), sehingga mengurangi ruang gerak manajemen perusahaan untuk melakukan *earnings management*.

Motivasi lain yang dapat memicu manajer untuk melakukan praktik manajemen laba adalah keinginan untuk meminimalkan risiko politik. Rekayasa laba untuk meminimalkan risiko politik tersebut dikenal dengan istilah *political cost hypothesis*. *Political cost hypothesis* menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik cenderung melakukan rekayasa laba dengan menurunkan laba untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Umumnya perusahaan yang melakukan ini adalah perusahaan yang berukuran besar dengan biaya politik tinggi.

Manajemen laba juga dimotivasi dengan adanya hubungan kontraktual antara perusahaan dengan kreditur yang dikenal dengan istilah *debt (equity) hypothesis*. Perusahaan akan mempertimbangkan untuk menurunkan laba dalam melakukan penghematan pajak karena ketika perusahaan menurunkan laba maka kepercayaan kreditur menjadi berkurang dan akan merubah *debt covenant* yang memberatkan perusahaan sesuai dengan kesepakatan semula.

Penelitian yang berkaitan dengan hubungan penurunan tarif PPh Badan terhadap *earnings management* diantaranya adalah Guenther (1994) di Amerika Serikat dengan adanya *Tax Reform Act 1986*, Balachandran, et.al, (2006) di Australia dengan adanya pengenalan *The Corporate Tax Law Changes* tahun 1987, dan Yamashita dan Otagawa (2007) di Jepang dengan adanya *Tax Rate Reduction in the Late 1990s*. Penelitian yang dilakukan oleh Yamashita dan Otagawa (2007) fokus pada akuntansi akrual dan hubungan antara dua pendapatan di Jepang yang lebih eksplisit, yang memungkinkan peneliti untuk menguji secara

langsung pergeseran pajak penghasilan. Peneliti menemukan bahwa, *discretionary accrual* negatif secara signifikan untuk tahun segera sebelum pengurangan tarif pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan Jepang mengatur laba rugi mereka untuk meminimalis biaya pajak penghasilan.

Penelitian lain dilakukan oleh Balachandran, et.al, (2006) di Australia, penemuannya konsisten dengan yang diharapkan, dimana perusahaan mengatur penurunan laba pada tahun sebelum implementasi sistem perolehan dividen dan tahun sebelum pengurangan tarif pajak badan dan sebaliknya pada tahun pertengahan setelah implementasi pengurangan tarif pajak badan.

Penelitian di Indonesia mengenai manajemen laba berkaitan dengan perubahan undang-undang pajak dilakukan oleh Siti Munfiah (2003), dan Wulandari dkk (2004). Siti Munfiah (2003) dalam penelitiannya menguji apakah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perpajakan tahun 2000 manajer akan berusaha menunda pengakuan pendapatan satu periode sebelum berlakunya penurunan tarif pajak baru dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang akan dibayar. Dalam penelitian ini Siti Munfiah tidak berhasil membuktikan bahwa perusahaan berusaha untuk menurunkan laba pada tahun 2000.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dkk (2004) bertujuan untuk menemukan bukti empiris, adanya praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan menjelang Undang-Undang Perpajakan tahun 2000. Dalam penelitiannya ini Wulandari dkk berhasil membuktikan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba untuk melakukan penghematan pajak menjelang UU perpajakan 2000. Ada perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Munfiah (2003) dengan Wulandari dkk (2004) yaitu : (1) Hasil Penelitian Siti

Munfiah (2003) tidak mengungkapkan tentang pengujian-pengujian asumsi tertentu yang disyaratkan sebelum dilakukan pengujian terhadap persamaan regresinya sedangkan Wulandari (2004) menggunakan pengujian-pengujian asumsi terhadap persamaan regresinya; (2) Siti Munfiah (2003) dalam perumusan model estimasi yang digunakan untuk estimasi tingkat *non-discretionary accrual* menggunakan model Jones dimana perubahan pendapatan yang dimasukkan ke dalam model untuk mengendalikan perubahan *non-discretionary accrual* yang disebabkan oleh kondisinya masih merupakan pendapatan kotor. Sedangkan Wulandari dkk (2004) dan mengestimasi tingkat *non-discretionary accrual* menggunakan model Jones yang telah dimodifikasi oleh Dechow (1995), yaitu perubahan pendapatan disesuaikan dengan perubahan piutang karena dalam pendapatan atas penjualan sudah tentu ada yang berasal dari penjualan secara kredit.

Dengan adanya perbedaan hasil para penelitian sebelumnya maka peneliti sekarang melakukan pengujian kembali untuk meninjau kekonsistenan hasil penelitian dalam mengindikasikan manajemen laba sebelum dan sesudah adanya undang-undang penurunan tarif pajak badan yang baru yaitu tahun 2008, dimana tarif pajak badan lebih rendah pada periode penelitian sekarang dari periode para penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian ini menambah variabel arus kas operasi saat ini (*Current Operating Cash Flow*)/OCF dalam menentukan tingkat estimasi *non-discretionary accrual* yang dimasukkan untuk mengontrol tingkat kinerja yang ekstrim dari perusahaan. Ditambah lagi, ruang lingkup penelitian ini lebih luas dari pada penelitian sebelumnya dengan adanya dua kali penurunan tarif yaitu pada penurunan tarif menjadi 28% dan penurunan tarif

menjadi 25%. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris adanya praktik manajemen laba dengan metode *discretionary accrual* yang dilakukan perusahaan sebelum dan sesudah perubahan tarif pada reformasi pajak 2008 baik pada penurunan tarif menjadi 28% maupun 25%.

1.2 Perumusan Masalah

Dari berbagai motivasi manajemen untuk melakukan *earning management* telah banyak dilakukan penelitian-penelitian yang menguji adanya perekrasan laba untuk tujuan menghemat pajak. Terdapat perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dengan adanya perbedaan tersebut dan adanya perubahan tarif PPh Badan pada Reformasi Pajak 2008, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui ada atau tidaknya tindakan manajemen laba untuk meminimalkan beban pajak penghasilan.

Maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

Apakah perubahan tarif PPh Badan pada Reformasi Pajak 2008 direspon oleh perusahaan dengan melakukan *earning management* guna meminimalkan beban pajak melalui rekayasa *discretionary accrual*.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

Menguji dan memberikan bukti empiris apakah dengan adanya perubahan tarif PPh Badan pada Reformasi Pajak 2008 direspon oleh Wajib Pajak Badan untuk melakukan *earning management* guna meminimalkan beban pajak

penghasilan melalui rekayasa *discretionary accrual*.

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kajian yang sama pada penelitian selanjutnya.
2. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai studi tentang manajemen laba untuk meminimalkan beban pajak.
3. Berguna bagi pembuat kebijakan peraturan perpajakan bahwa setiap adanya perubahan Undang-undang akan direspon oleh wajib pajak, sehingga pemerintah/fiskus dapat mengantisipasi perilaku wajib pajak dan pengaruhnya terhadap wajib pajak serta pengaruhnya terhadap penerimaan negara dari pajak.

1.4 Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri atas lima bagian. *Pertama*, bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. *Kedua*, bagian tinjauan pustaka yang berisi landasan teori, penelitian-penelitian sebelumnya, serta kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis penelitian. *Ketiga*, bagian metode penelitian yang berisi variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik analisis data. *Keempat*, bagian hasil penelitian dan pembahasan yang berisi gambaran umum sampel penelitian, statistika deskriptif, pengujian hipotesis, dan pembahasan. *Kelima*, bagian penutup yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Timbulnya praktek manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Teori agensi dimulai ketika pemilik perusahaan tidak mampu mengelola perusahaan sendiri, sehingga pemilik harus melakukan kontrak dengan para eksekutif untuk menjalankan perusahaan sebagai agen, secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan menerima kompensasi sesuai dengan kontrak.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Siti Munfiah (2003) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Oleh karena itu kontrak yang baik antara investor dan manajer adalah kontrak yang mampu menjelaskan apa saja yang harus dilakukan manajer dalam melakukan pengelolaan dana yang diinvestasikan dan pembagian *return* antara manajer dan investor.

Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan merupakan biaya yang timbul karena perusahaan menggunakan hutang dan melibatkan hubungan antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditor.

Principal dapat membatasi penyimpangan (*divergencies*) dari kepentingan dengan menetapkan insentif yang layak dan mengeluarkan biaya monitoring

(*monitoring cost*) yang dirancang untuk membatasi penyimpangan aktivitas-aktivitas yang dilakukan agen. Dalam beberapa situasi tertentu, agen memungkinkan untuk membelanjakan sumber daya perusahaan (*biaya bonding/bonding cost*) untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak yang dapat merugikan *principal*. Nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kesejahteraan yang dialami oleh *principal* juga merupakan biaya yang timbul dari hubungan keagenan. Biaya jenis ini disebut kerugian residual (*residual loss*).

Asumsi teori *agency* adalah bahwa masing-masing individu adalah *economic rational man* dan kontrak antara *principal* dan *agent* dibuat berdasarkan angka akuntansi sehingga hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. *Principal* termotivasi untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang semakin meningkat sedangkan *agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomis dan psikologisnya. Berdasarkan asumsi sifat manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic* yang mengutamakan kepentingan pribadinya (Haris, 2004).

Adanya perbedaan kepentingan dan informasi antara *principal* dan *agent* memicu *agent* untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi yang dihasilkan dapat lebih memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomis dan psikologisnya. Cara yang dapat dilakukan *agent* untuk mempengaruhi angka akuntansi tersebut yaitu dengan melakukan manajemen laba.

2.1.2 Manajemen Laba

Laporan keuangan adalah cerminan dari kondisi perusahaan karena memuat informasi mengenai laporan kinerja manajemen, laporan arus kas dan

laporan perubahan posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan juga menunjukkan sejauh mana kinerja manajemen dan merupakan sumber dalam mengevaluasi kinerja manajemen. Dalam laporan keuangan biasanya yang dijadikan parameter utama adalah besarnya laba perusahaan. Dengan adanya penilaian kinerja manajemen tersebut dapat mendorong timbulnya perilaku menyimpang dari pihak manajemen perusahaan yang salah satu bentuknya adalah manajemen laba (*earnings management*). Manajemen laba merupakan tindakan manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu untuk mempengaruhi laba yang akan terjadi menjadi seperti yang mereka inginkan melalui “pengelolaan” faktor internal yang dimiliki atau digunakan perusahaan. Scott, (2000) mendefinisikan *earnings management* sebagai “*earnings management is the choice by a manager of accounting policies so as to achieve some specific objective*”. Yang artinya *earnings management* adalah pilihan yang dilakukan oleh manajemen dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu.

Menurut Sugiri (1998), definisi *earnings management* dibagi dalam dua definisi, yaitu :

a. Defenisi Sempit

Bahwa *earnings management* hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Selain itu juga diartikan sebagai perilaku manajer untuk “bermain” dengan komponen *discretionary accrual* dalam menentukan *earnings*.

b. Defenisi Luas

Earnings management merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan atau mengurangi laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer

bertanggung jawab tanpa mengakibatkan peningkatan atau penurunan profitabilitas ekonomi jangka panjang.

Konsep *earning management* menurut Salno dan Baridwan (2000) menggunakan pendekatan teori keagenan (*Theory Agency*) yang menyatakan bahwa praktek *earnings management* dipengaruhi oleh konflik antara kepentingan manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) yang timbul karena setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendaknya. Dalam hubungan keagenan, manajer mempunyai informasi yang asimetris terhadap pihak eksternal perusahaan seperti kreditor dan investor. Informasi asimetris terjadi ketika manajer memiliki informasi internal perusahaan yang relatif lebih banyak dan mengetahui informasi tersebut lebih cepat dibandingkan pihak eksternal. Dalam kondisi demikian manajer dapat menggunakan informasi yang diketahuinya untuk membuat laporan keuangan dalam usaha memaksimalkan kemakmurannya.

Pola *earnings management* yang biasa dilakukan menurut Scott (2000) yaitu :

1. *Taking a Bath*

Yaitu manajemen mencoba mengalihkan *expected future cost* ke masa kini agar memiliki peluang yang lebih besar mendapatkan laba di masa yang akan datang. Biasanya dilakukan bila perusahaan mengadakan restrukturisasi atau reorganisasi.

2. *Income Minimization*

Yaitu manajemen mencoba memindahkan beban ke masa kini agar memiliki peluang yang lebih besar mendapatkan laba di masa mendatang.

3. *Income Maximization*

Yaitu manajemen mencoba meningkatkan laba masa kini dengan memindahkan beban ke masa mendatang. Biasanya dilakukan manajer dalam rangka memperoleh bonus tahunan.

4. *Income Smoothing*

Yaitu tindakan dimana manajemen memperhalus fluktuasi laba dari periode ke periode dengan cara memindahkan laba dari periode yang memiliki laba tinggi ke periode yang memiliki laba rendah.

Menurut Gumanti (2000) ada tiga faktor penyebab terjadinya *earnings management*, yaitu :

1. Manajemen akrual

Earnings management biasanya dikaitkan dengan semua aktivitas yang dapat dipengaruhi aliran kas dan keuntungan yang secara pribadi merupakan wewenang dari para manajer.

2. Penerapan suatu kebijakan akuntansi yang wajib

Earnings management berkaitan dengan keputusan manajer untuk menerapkan suatu kebijaksanaan akuntansi yang wajib diterapkan oleh perusahaan, yaitu antara menerapkannya lebih awal dari waktu yang ditetapkan atau menundanya sampai saat berlakunya kebijaksanaan tersebut.

3. Perubahan akuntansi secara sukarela

Earnings management berkaitan dengan upaya manajer untuk mengganti atau mengubah suatu metode akuntansi tertentu diantara sekian banyak metode yang dapat dipilih yang tersedia dan diakui oleh badan akuntansi yang ada.

2.1.3 Motivasi *Earning Management*

Menurut Scott (2000), terdapat berbagai motivasi mengapa perusahaan, dalam hal ini manajer, melakukan *earnings management*, yaitu :

1. *Other Contractual Motivations*

Secara umum untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kontraktual termasuk perjanjian hutang (*debts covenants*).

2. *To Communicate Information To Investors*

Investor akan melihat kebijakan akuntansi yang dipilih ketika mengevaluasi dan membandingkan *earning*.

3. *Political Motivations*

- Untuk mengurangi biaya politis dan pengawasan dari pemerintah, dilakukan dengan cara menurunkan *earning*.
- Untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah, misalnya subsidi, perlindungan dari pesaing luar negeri, dilakukan dengan cara menurunkan *earning*.
- Untuk meminimalkan tuntutan serikat buruh, dilakukan dengan cara menurunkan *earning*.

4. *Taxation Motivations*

Perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menghasilkan laba dilaporkan lebih rendah, sehingga pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah juga menjadi lebih rendah.

5. *Changes of Chief Executive Officer (CEO)*

CEO yang mendekati akhir jabatannya cenderung melakukan *income maximation* untuk meningkatkan bonus mereka.

6. Initial Public Offerings (IPO)

Perusahaan yang akan melakukan penawaran saham perdana (IPO) cenderung melakukan *income increasing* untuk menarik calon investor.

Faktor pendorong yang mempengaruhi manajer dalam melakukan manajemen laba (Imam Ghazali & Anis Chariri, 2007) diantaranya :

1. *Bonus Plan Hypotesis*, yang menyatakan bahwa kompensasi manajerial akan cenderung memilih dan menggunakan metode akuntansi yang dapat membuat laba yang dilaporkan menjadi lebih tinggi.

2. *Debt (Equity) Hypotesis*, yang menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio antara utang dan ekuitas yang lebih besar cenderung akan memilih dan menggunakan metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih tinggi serta cenderung melanggar perjanjian hutang apabila manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperoleh oleh manajer.

3. *Political Cost Hypotesis*, dimana perusahaan cenderung memilih dan melaporkan metode-metode akuntansi yang dapat memperkecil atau memperbesar laba yang dilaporkannya.

2.1.4 Pengertian Akrua

Dalam akuntansi dikenal istilah basis akrual (*accrual basis*) dan basis kas (*cash basis*). Istilah akrual ini digunakan untuk menentukan penghasilan (*revenue*) pada saat diperoleh dan untuk mengakui beban yang sepadan dengan *revenue* pada periode yang sama, tanpa memperhatikan waktu penerimaan kas dari penghasilan yang bersangkutan. Sedang istilah basis kas adalah pengakuan beban dan *revenue* atas dasar kas tunai yang diterima. Pengakuan atas dasar kas ini menyimpang dari

konsep dasar akuntansi yaitu *matching of cost with revenue* (memadankan antara penghasilan dan beban) sehingga konsep pengakuan *revenue* dan beban atas dasar kas tunai yang diterima tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Pengertian akrual dapat diartikan lawan dari kas sebagai dasar pengakuan pendapatan dan beban. Konsep akrual digunakan untuk memenuhi konsep dasar akuntansi *matching of cost with revenue* (memadankan antara penghasilan dan beban). Menurut konsep dasar *matching of cost with revenue*, pengakuan beban atau pendapatan harus diakui sesuai dengan hak yang diukur dalam satu periode akuntansi tidak mempertimbangkan adanya penerimaan kas tunai, karena konsep dasar kas tidak dapat memenuhi kriteria kesepadanan antara penghasilan dan beban atau *matching of cost with revenue*. Oleh karena itu pengakuan pendapatan dan beban menurut standar akuntansi yang diterima oleh umum menggunakan konsep akrual. Dalam prosesnya konsep akrual ini memungkinkan adanya perilaku untuk manajer melakukan rekayasa laba atau *earning management* guna menaikkan atau menurunkan porsi angka akrual dalam laporan laba rugi.

Perekayasaan menaikkan atau menurunkan akrual antara lain dapat dilakukan dengan cara menunda pengakuan pendapatan atau mempercepat pengakuan beban. Perekayasaan laba tersebut termasuk salah satu praktek manajemen laba (*earning management*) melalui rekayasa akrual. Yang menarik, laba sering digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan dan menyusun kontrak oleh berbagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai konsekuensi ekonomi. Sebagai contoh, laba sering digunakan sebagai dasar untuk menghitung penghasilan kena pajak, serta laba juga digunakan sebagai kriteria penilaian kinerja perusahaan.

Ada dua konsep akrual, yaitu : *discretionary accrual* dan *non-discretionary accrual*. *Discretionary accrual* adalah pengakuan akrual pendapatan atau beban yang bebas tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan manajemen, contoh : Pada akhir tahun buku perusahaan mengetahui bahwa suatu piutang tertentu tidak dapat ditagih. Perusahaan dapat melakukan pencatatan kapan piutang tersebut dihapuskan, pada periode buku sekarang atau pada tahun buku berikutnya. Sedangkan *non-discretionary accrual* adalah sebaliknya, pengakuan akrual laba yang wajar yang tunduk terhadap suatu standar atau prinsip akuntansi yang berterima umum, contoh : satu fakta yang sama dapat dilaporkan dengan cara yang berbeda, mesin yang sama dapat didepresiasi dengan dua metode yang berbeda (metode depresiasi garis lurus dan metode saldo menurun) atau dengan dua estimasi umur ekonomis yang berbeda. Perbedaan metode atau perbedaan estimasi tersebut akan menghasilkan nilai akhir atau laba yang sedikit berbeda. Oleh karena *non discretionary accrual* merupakan akrual yang wajar, dan apabila dilanggar akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan tidak wajar maka *non discretionary accrual* ini tidak relevan dengan objek penelitian ini. Oleh karena itu bentuk akrual yang dianalisis dalam penelitian ini adalah bentuk *discretionary accrual* yang merupakan akrual tidak normal dan merupakan pilihan kebijakan manajemen dalam pemilihan metode akuntansi.

2.1.5 Pengukuran Manajemen Laba dengan Pendekatan *Discretionary Accrual*

Dechow et.al (1995) telah mengevaluasi beberapa model untuk mendeteksi dan mengukur manajemen laba berdasarkan akrual.

Berbagai model tersebut adalah sebagai berikut :

1. Model Healy

Healy (1985) menguji manajemen laba dengan membandingkan rata-rata total akrual (diskala dengan lag total aset) antara variabel yang merupakan bagian manajemen laba.

Model Healy dirumuskan sebagai berikut:

$$NDA_{\tau} = \frac{\sum TA_t}{T} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

NDA = Estimasi *nondiscretionary accrual*

TA = Total akrual yang diskala dengan lag total aset.

t = 1,2,...t merupakan tahun subscript untuk tahun-tahun yang termasuk dalam periode estimasi.

τ = Tahun *subscript* yang menunjukkan suatu tahun dalam periode berjalan.

2. Model DeAngelo

DeAngelo (1986) menguji manajemen laba dengan memperhitungkan perbedaan pertama dalam total akrual, serta mengasumsikan bahwa perbedaan pertama mempunyai suatu nilai ekspektasi nol di bawah hipotesis nol yaitu tidak adanya manajemen laba.

Nondiscretionary Accrual berdasarkan model DeAngelo dirumuskan :

$$NDA_{\tau} = \sum TA_t - 1 \dots\dots\dots(2)$$

3. Model Jones

Model Jones (1991) berusaha untuk mengontrol dampak perubahan ekonomi perusahaan terhadap *nondiscretionary accrual*. Model Jones untuk *nondiscretionary accrual* dirumuskan sebagai berikut :

$$NDA_t = \alpha_1 (1/At_{t-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_t) + \alpha_3 PPE_t \dots\dots\dots(3)$$

dimana :

ΔREV_t = Pendapatan tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1 yang diskala oleh total aset pada tahun t-1.

PPE_t = Peralatan dan properti pabrik tahun yang diskala dengan total aset pada tahun t-1.

$At - 1$ = Total akrual pada tahun t-1.

NDA_t = *Nondiscretionary accrual* perusahaan.

4. Model Industri

Berasumsi bahwa variasi-variasi yang terdapat pada faktor-faktor penentu *nondiscretionary accrual* biasa terjadi pada perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama. Model industri untuk *nondiscretionary accrual* dirumuskan sebagai berikut ;

$$NDA_t = \gamma_1 + \gamma_2 (Median_1 TA_t) \dots\dots\dots(4)$$

dimana :

$Median_1 TA_t$ = Nilai median dari total akrual yang diskala dengan lag aset untuk semua perusahaan *non sampel* yang sama dengan 2 digit kode SIC

$\gamma_1 + \gamma_2$ = Parameter spesifik perusahaan

5. Model Jones yang Dimodifikasi

Model Jones dimodifikasi oleh Dechow, Sloan dan Sweeney (1995) dirancang untuk mengurangi kecenderungan terjadinya kesalahan model Jones, ketika *discretionary* diterapkan pada pendapatan. Perubahan pendapatan disesuaikan dengan perubahan piutang, karena dalam pendapatan atas penjualan sudah tentu ada yang berasal dari penjualan secara kredit. Pengurangan terhadap

nilai piutang untuk menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima benar-benar merupakan pendapatan bersih (Dechow et.al, 1995).

Seperti yang dilakukan Jones (1991), perhitungan dilakukan dengan menghitung total laba akrual, kemudian memisahkan *nondiscretionary accrual* (tingkat laba akrual yang wajar) dan *discretionary accrual* (tingkat laba akrual yang tidak normal).

Total akrual merupakan selisih antara *net income* dengan *cash flow operation* yang dirumuskan sebagai berikut (Sook, 1998) :

$$TA_{it} = N_{it} - CFO_{it} \dots\dots\dots(5)$$

TA_{it} = Total akrual perusahaan i ada tahun t

N_{it} = Laba bersih (*Net Income*) perusahaan I pada tahun t

CFO_{it} = Kas dari operasi (*cash flow operation*) perusahaan i pada tahun t.

Total akrual (TA_{it}) sendiri juga merupakan penjumlahan dari *nondiscretionary accrual* dengan *discretionary accrual* dengan persamaan sebagai berikut:

$$TA_{it} = NDA_{it} + DA_{it} \dots\dots\dots(6)$$

dimana :

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

NDA_{it} = *Nondiscretionary accrual* perusahaan i pada tahun t

DA_{it} = *Discretionary accrual* pada perusahaan i pada tahun t

Total akrual kemudian dirumuskan oleh Jones (1991) yang dimodifikasi oleh Dechow et. al (1995) sebagai berikut :

$$TA_{it} / A_{it-1} = \alpha_1 (1 / A_{it-1}) + \beta_1 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} - \Delta REC_{it} / A_{it-1} \right) + \beta_2 (PPE_{it} / A_{it-1}) + \varepsilon_{it}$$

dimana :

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

A_{it-1} = Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1

ΔREV_{it} = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan pada tahun t-1.

ΔREC_{it} = Piutang perusahaan i pada tahun t dikurang piutang tahun t-1.

PPE_{it} = Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t

ε_{it} = Error term perusahaan i pada tahun t

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

Perhitungan *nondiscretionary accrual* menurut model Jones yang dimodifikasi kemudian dirumuskan sebagai berikut :

$$NDA_{it} = \alpha_1 (1 / A_{it-1}) + \beta_1 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} - \Delta REC_{it} \right) + \beta_2 (PPE_{it} / A_{it-1}) \dots \dots \dots (8)$$

dimana :

DA_{it} = *Discretionary accrual* pada perusahaan i pada tahun t

A_{it-1} = Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1

ΔREV_{it} = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1.

ΔREC_{it} = Piutang perusahaan i pada tahun t dikurang piutang tahun t-1.

PPE_{it} = Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t.

Dalam penelitian ini, *discretionary accrual* sebagai proksi atas manajemen laba diukur dengan menggunakan *Modified Jones Model*, karena model ini mempunyai standar *error* dari ε_{it} (*error term*) hasil regresi estimasi nilai total akrual yang paling kecil dibandingkan model-model yang lainnya. (Dechow et. al, 1995).

2.1.6 Pengertian Laba (*Income*)

Income dalam konteks perpajakan dapat berbeda dengan makna *income* dalam akuntansi atau pelaporan keuangan. Dalam perpajakan, *income* dimaknai sebagai jumlah kotor sehingga dimaknai sebagai penghasilan sebagaimana digunakan dalam Standar Akuntansi Keuangan. Sedangkan *income* dalam akuntansi lebih dimaknai sebagai kenaikan aset bersih selain yang berasal dari transaksi dari pemilik.

Pada konsep akrual laba diukur dengan memadankan antara penghasilan dan beban tidak didasarkan atas kas tunai yang diterima. Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2007, penghasilan diakui dalam laporan laba rugi hanya bila besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut mengalir kepada perusahaan. Prosedur yang biasanya dianut dalam praktik untuk mengakui penghasilan, seperti misalnya ketentuan bahwa penghasilan telah diperoleh merupakan penerapan kriteria pengakuan dalam kerangka dasar akuntansi. Sedangkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi, kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan handal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva (misalnya akrual hak karyawan, atau penyusutan aktiva tetap).

Dari konsep *matching of cost with revenue* dalam laporan laba rugi akan diperoleh laba atau rugi. Laba (*earning*) merupakan selisih antara pendapatan dan biaya yang menunjukkan sisa positif, sebaliknya rugi apabila menunjukkan sisa negatif. Perusahaan dengan laba yang rendah biasanya dianggap kinerjanya

kurang berhasil dibandingkan perusahaan yang dapat menghasilkan laba yang tinggi. Selain itu, laba juga sering dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan oleh berbagai pihak antara lain investor, kreditor, manajemen dan pemerintah. Pemerintah, dalam hal ini berkepentingan terhadap besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan (Dhaliwal et. al, 1994; Guenther 1994; Maydew 1997) dalam Siti Mufiah (2003). Dengan adanya konsep *matching of cost with revenue* ini sering manajemen memanfaatkan konsep akrual untuk melakukan manajemen laba guna mencapai tujuan-tujuan tertentu, misalnya harapan manajemen untuk memperoleh bonus, mengurangi *volatility of earnings*, untuk meminimalkan beban pajak penghasilan, dan merekayasa laba untuk tujuan lainnya.

Untuk menganalisis ada atau tidaknya rekayasa laba, maka dilakukan dengan menghitung total laba akrual, kemudian memisahkan *non discretionary accrual* (tingkat laba akrual yang wajar) dan *discretionary accrual* (tingkat laba yang tidak normal) untuk setiap perusahaan dalam setiap tahun. Laba akrual merupakan laba bersih operasi yang didasarkan pada perhitungan akrual, sedangkan *non discretionary accrual* merupakan laba akrual yang wajar yang tidak dipengaruhi oleh manajemen, dan *discretionary accrual* adalah tingkat laba abnormal yang merupakan pilihan pihak manajemen.

2.1.7 Perubahan Tarif PPh Badan Menurut UU Perpajakan di Indonesia

Perubahan UU Pajak terbaru di Indonesia terjadi tahun 2008 meliputi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), serta Undang-Undang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM). Hal ini diatur berdasarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2007, UU No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008.

Pada tahun 2007 amandemen Undang-undang tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah efektif sejak 1 Januari 2008. Selain UU No. 28/2007 tersebut DJP (Direktorat Jenderal Pajak) bersama DPR telah berhasil menyelesaikan UU No. 36/2008 pada tanggal 23 September 2008, yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008 ada 5 (lima) hal yang diatur dalam penurunan tarif . Pertama, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh potongan tarif pajak penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang PPh. Kedua, Penurunan Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud diatas diberikan kepada Wajib Pajak apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) dan atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak. Ketiga, masing-masing pihak sebagaimana dimaksud diatas

hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor. Keempat, ketentuan sebagaimana dimaksud diatas harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Terakhir, waktu enam bulan sebagaimana dimaksud diatas adalah 183 (seratus delapan puluh tiga) hari.

Salah satu perubahan yang mencolok pada ketentuan pajak penghasilan adalah perubahan tarif yang membedakan antara Wajib Pajak (WP) Badan dan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dan perubahan lapisan penghasilan kena pajak.

Pada table 2.1 disajikan adanya perubahan tarif dan lapisan penghasilan kena pajak badan sejak diundangkannya UU PPh tahun 1984 sampai dengan tahun 2008. Ada empat kali perubahan tarif yaitu UU PPh tahun 1983 yang mulai berlaku tahun 1984, tarif UU PPh tahun 1994 yang mulai berlaku tahun 1995, UU PPh tahun 2000 yang mulai berlaku pada tahun 2001, dan UU PPh tahun 2008 yang mulai berlaku tahun 2009.

Jika perusahaan memandang moment perubahan UU tersebut sebagai kesempatan untuk meminimalkan pajak, maka perusahaan dapat memanfaatkan peluang untuk menunda pengakuan pendapatan atau mempercepat pengakuan biaya pada tahun sebelum perubahan tarif, sehingga akan menurunkan laba pada tahun tersebut. Artinya, dengan penundaan pengakuan pendapatan atau percepatan biaya ke tahun sebelum perubahan tarif akan menjadikan laba tahun tersebut lebih rendah. Pendapatan yang ditunda pengakuannya akan dilaporkan pada laporan keuangan tahun sesudah perubahan tarif, maka akan dihemat pajak sebesar tarif dikalikan selisih lapisan penghasilan kena pajak.

Tabel 2.1

Perbedaan Tarif UU PPh Badan 1983, 1994, 2000, dan 2008

UU No. 7 / 1983 PKP dan Tarif	UU No. 10 /1994 PKP dan Tarif	UU No. 17 /2000 PKP dan Tarif	UU No. 36 / 2008 PKP dan Tarif
PKP s/d 10.000.000 = 15 %	PKP s/d 25.000.000 = 10 %	PKP s/d 50.000.000 =10 %	
PKP diatas 10.000.000 s/d 50.000.000 = 25 %	PKP diatas 25.000.000 s/d 50.000.000 = 15 %	PKP diatas 50.000.000 s/d 100.000.000 = 15 %	Tarif W P Badan & bentuk usaha tetap adalah 28%, dan bisa turun sebesar 5% untuk WP berbentuk perseroan terbuka yg paling sedikit 40 % dari jumlah keseluruhan saham yg disetor, diperdagangkan di BEI dan atau lebih dari keseluruhan saham disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit 300 pihak.
PKP diatas 50.000.000 = 35 %	PKP diatas 50.000.000 = 30 %	PKP diatas 100.000.000 = 30 %	

Sumber : UU Perpajakan ([www.google .com](http://www.google.com))

2.2 Penelitian Terdahulu

Selain berpedoman kepada teori-teori yang diperoleh dari literatur-literatur yang dijadikan acuan, penelitian ini juga melihat pada penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan. Hidayati dan Zulaikha (2003) melakukan penelitian mengenai adanya perilaku *earning management* menggunakan pendekatan *discretionary accrual*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang Perpajakan tahun 2000 tidak direspon oleh Wajib Pajak Badan untuk melakukan *earning management* dengan tujuan untuk meminimumkan

beban pajak penghasilan perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya perbedaan *discretionary accrual* pada tahun 2000 dan 2001, dan hal ini diinterpretasikan bahwa perusahaan tidak menunda pelaporan pendapatan tahun 2000 dan menggesernya ke tahun 2001 dalam merespon Undang-Undang Perpajakan 2000 tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan Zulaikha (2003) konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan Na'im (2000) yang menguji apakah terdapat perilaku manajemen laba di perusahaan manufaktur pada saat penurunan tarif pajak tahun 1994. Hasil penelitiannya tidak membuktikan adanya perilaku perusahaan untuk menurunkan laba setelah penurunan tarif pajak tahun 1994 tersebut.

Selain penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan Na'im (2000) serta Hidayati dan Zulaikha (2003), di Amerika Serikat sebelumnya juga telah dilakukan penelitian mengenai perilaku yang memanfaatkan perubahan peraturan perpajakan dimana terjadi evaluasi perilaku manajemen laba dalam kaitannya dengan minimalisasi pajak., atau dikenal juga dengan istilah *Tax Reform Act* (TRA) (Guenther, 1994). TRA dipublikasikan pada bulan September tahun 1986 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 1987. Dengan TRA, tingkat pajak maksimum perusahaan berkurang dari 46% menjadi 34%. Penundaan pengakuan pendapatan sebesar \$1 dari satu periode sebelum TRA efektif ke satu periode setelah TRA efektif dapat menghemat pajak sebesar \$0,12. Penghematan pajak ini dapat juga diartikan sebagai tambahan laba sebesar 22% ($0,12/(1-0,46)$) yang dapat diperoleh hanya dengan menunda pengakuan pendapatan satu periode fiskal. Dalam penelitiannya, Guenther mencoba mengevaluasi pengaruh publikasi

TRA terhadap perusahaan di Amerika. Hasil penelitiannya tidak berhasil membuktikan adanya *negatif accrual* pada satu periode sebelum berlakunya TRA 1986.

Wulandari, dkk (2004) meneliti tentang adanya indikasi manajemen laba menjelang Undang-Undang Perpajakan tahun 2000. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa praktik manajemen laba masih tetap dilakukan dengan adanya perubahan Undang-Undang Perpajakan 2000. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat *discretionary accrual* yang lebih tinggi setelah perubahan Undang-Undang dibandingkan sebelum perubahan Undang-undang. Dengan dibuktikannya penelitian ini, maka menunjukkan bahwa pihak manajemen perusahaan cenderung untuk mentransfer pendapatannya pada periode setelah Undang-Undang Perpajakan, karena pada periode ini tarif pajak penghasilannya telah menurun sehingga perusahaan dapat memperoleh penghematan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yamashita dan Otagawa (2007) meneliti tentang pengaruh publikasi perubahan Undang-undang tarif pajak penghasilan badan terhadap perusahaan Jepang. Dalam penelitiannya ini membuktikan terdapat signifikansi negatif *discretionary accrual* untuk tahun sebelum penurunan tarif pajak. Hal ini membuktikan bahwa manajer perusahaan menunda penghasilan dalam menanggapi perubahan Undang-Undang Perpajakan yang digunakan untuk meminimalkan biaya pajak penghasilan badan.

Subagyo dan Oktavia (2010) melakukan penelitian tentang manajemen laba yang digunakan sebagai respon atas perubahan tarif pajak penghasilan badan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang melakukan manajemen laba dalam rangka merespon perubahan tarif pajak badan di Indonesia

adalah perusahaan yang memperoleh laba, sedangkan perusahaan yang mengalami kerugian tidak melakukan manajemen laba dalam rangka merespon perubahan tarif pajak badan. Selain itu, diketahui pula bahwa manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang memperoleh laba dipengaruhi oleh insentif pajak dan non pajak, sedangkan manajemen laba yang dilakukan perusahaan yang mengalami kerugian hanya dipengaruhi oleh insentif non pajak.

Tabel 2.2
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Guenther (1994)	<i>Earnings Management in Response to Corporate Tax Rate Changes : Evidence From The 1986 Tax Reform Act</i>	Menguji apakah perusahaan yang tidak mengalami <i>net operating loss</i> melakukan penurunan akrual untuk memaksimumkan an penghematan pajak	Tidak berhasil membuktikan bahwa satu periode sebelum TRA 1986 perusahaan melakukan penurunan akrual untuk memaksimumkan an penghematan pajak
2.	Setiawati dan Na'im (2000)	Manajemen Laba	Menguji apakah perilaku <i>earning management</i> di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ dalam merespon Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994 yang mulai berlaku 1995	Tidak terbukti adanya perilaku perusahaan yang berusaha menurunkan laba pada tahun 1994 dengan tujuan untuk mendapatkan penghematan pajak pada tahun bersangkutan

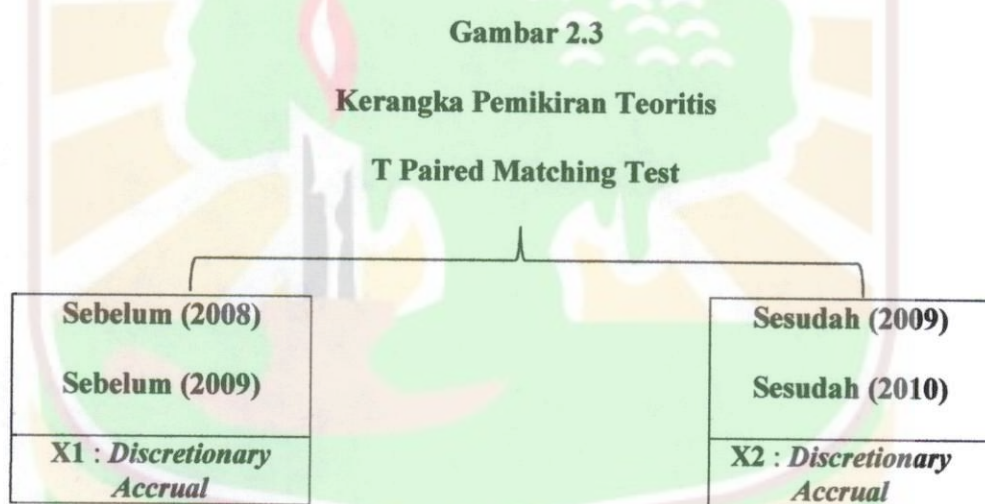
3.	Hidayati dan Zulaikha (2003)	Analisis Perilaku <i>Earning Management : Motivasi Minimalisasi Income Tax</i>	Menguji apakah dengan adanya perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 direspon oleh wajib pajak untuk melakukan <i>earning management</i> melalui rekayasa <i>discretionary accrual</i> guna meminimalkan beban pajak penghasilan melalui rekayasa <i>discretionary accrual</i> serta menguji apakah ada perbedaan <i>discretionary accrual</i> sebelum dan sesudah reformasi pajak 2000	Perubahan pajak penghasilan tahun 2000 tidak direspon oleh wajib pajak badan untuk melakukan <i>earning management</i> melalui rekayasa <i>discretionary accrual</i>
4.	Wulandari dkk (2004)	Indikasi Manajemen Laba Menjelang Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEJ	Menemukan bukti empiris adanya praktek manajemen laba yang dilakukan perusahaan menjelang Undang-undang Perpajakan 2000	<i>Discretionary Accrual</i> periode setelah perubahan undang-undang lebih tinggi daripada sebelum perubahan
5.	Yamashita dan Kazuhisa Otagawa (2007)	<i>Do Japanese Firm Manage Earnings in Response to Tax Rate Reduction in The Late 1990s</i>	Menginvestigasi pengaruh publikasi perubahan UU tarif pajak	Terdapat signifikansi negative <i>discretionary accrual</i> untuk

			penghasilan badan terhadap perusahaan jepang	tahun sebelum penurunan tarif
6.	Subagyo dan Oktavia (2010)	Manajemen Laba Sebagai Respon Atas Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia	Menguji apakah perusahaan melakukan manajemen laba sebagai respon atas perubahan tarif pajak badan di Indonesia, serta menguji apakah manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dimotivasi oleh insentif pajak dan insentif non pajak	Perusahaan manufaktur yang melakukan manajemen laba dalam rangka merespon perubahan tarif pajak badan di Indonesia adalah perusahaan yang memperoleh laba sedangkan perusahaan yang memperoleh kerugian tidak akan merespon perubahan tarif pajak badan dengan melakukan manajemen laba. Ditemukan pula bukti bahwa manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang memperoleh laba dipengaruhi oleh insentif pajak dan non pajak, sedangkan perusahaan yang

				memperoleh kerugian hanya dipengaruhi oleh insentif non pajak saja
--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini menguji apakah dengan adanya *moment* perubahan tarif PPh Badan dalam UU tahun 2008 yang diberlakukan tahun 2009 dan 2010 direspon oleh manajemen untuk melakukan *earning management* dengan tujuan untuk meminimumkan beban pajak penghasilan dengan menggunakan rekayasa akrual.



2.4 Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 dan Manajemen Laba

Dalam Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang mengubah Undang-undang No.7/1983, Undang-undang No.10/1994, dan Undang-undang No.17/1999 tentang pajak penghasilan yang berlaku efektif per 1 Januari

2009, terdapat perubahan pada tarif, baik Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Undang-undang No.36/2008 membedakan tarif dan lapisan PKP. Adanya perubahan tarif dapat memberikan insentif bagi manajemen untuk melakukan rekayasa laba dengan akrual pada tahun 2008 dan laba tahun 2009 dengan cara mempercepat pengakuan biaya yang selanjutnya dibebankan ke laba tahun sebelumnya atau menunda pengakuan pendapatan dan memasukkan pendapatan tersebut ke laba tahun berikutnya. Begitu juga akrual pada tahun 2009 dan laba tahun 2010.

Menurut Scott (2000) motivasi dilakukan *earning management* atau rekayasa laba, salah satunya adalah *taxation motivation*, dalam hal ini manajer berusaha untuk menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Perilaku manajemen yang mendasari lahirnya manajemen laba adalah perilaku *opportunistic* yang memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, hutang dan *political cost* (Scott, 2000). Perilaku oportunis ini direfleksikan dengan melakukan rekayasa keuangan dengan menerapkan *income increasing* atau *income decreasing discretionary accrual*.

Political Cost Hipotesys (Belkaoui, 2000) menyatakan bahwa perusahaan berusaha menyajikan laporan keuangan yang meminimalkan laba agar diperoleh biaya politik (pajak) yang minimal. Perusahaan cenderung mengatur *accounting accruals* untuk memperoleh keuntungan pajak dari adanya perubahan peraturan pajak. Manajemen dapat memanfaatkan konsep akuntansi akrual untuk merencanakan laba yang diinginkan. Hal ini memberikan dampak bahwa perusahaan cenderung akan menurunkan laba agar dapat meminimalkan jumlah pajak yang dibayar.

Dari pemikiran tersebut dan berdasarkan kajian penelitian terdahulu, maka dengan adanya perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2008 akan memberikan insentif bagi wajib pajak untuk melakukan *earning management* dengan menunda pengakuan pendapatan satu periode sebelum berlaku peningkatan lapisan pajak ke tahun berikutnya dan membebaskan pendapatan yang ditunda tersebut kedalam laporan keuangan periode berlakunya tarif dan lapisan penghasilan kena pajak baru dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak penghasilan yang harus dibayar. Jadi, jika wajib pajak tersebut melakukan *earning management* dimana nilai *discretionary accrual* mengindikasikan tingkat akrual hasil *earning management*, maka nilai *discretionary accrual* pada tahun setelah berlakunya tarif pajak yang baru akan bernilai positif atau akan lebih rendah dari tahun sebelum perubahan tarif pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu, hipotesis adalah sebagai berikut :

$H0_1$: *Discretionary accrual* sesudah perubahan penurunan tarif WP Badan tahun 2008 lebih rendah dari pada sebelum perubahan UU perpajakan tahun 2008.

$H0_2$: *Discretionary accrual* sesudah perubahan penurunan tarif WP Badan tahun 2009 lebih rendah dari pada sebelum perubahan UU perpajakan tahun 2009.

HA_1 : *Discretionary accrual* sesudah perubahan penurunan tarif WP Badan tahun 2008 lebih tinggi dari pada sebelum perubahan UU perpajakan tahun 2008.

HA_2 : *Discretionary accrual* sesudah perubahan penurunan tarif WP

Badan tahun 2009 lebih tinggi dari pada sebelum perubahan UU
perpajakan tahun 2009.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Pengujian manajemen laba dalam penelitian ini menggunakan ukuran *discretionary accrual* yang diperoleh dari *error term* total akrual yang dikembangkan oleh Jones (1991) yang telah dimodifikasi oleh Dechow (1995), Gill-de-Albornoz and Illueca (2005), Phillips et al. (2003), Kaznik (1999), and Jeter and Shivakumar (1999), alasan menggunakan model ini karena memperhitungkan kas pada operasi, variabel arus kas operasi saat ini untuk mengontrol tingkat kinerja yang ekstrim karena arus kas operasi sangat menentukan besarnya laba yang akan diperoleh dimana semakin besar kas operasi menunjukkan kesempatan untuk memperoleh laba besar sehingga sangat dimungkinkan manajemen laba akan dilakukan pada kas operasi.

3.1.2 Defenisi Operasional

Model pengujian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model Jones (1991) yang telah dimodifikasi untuk menghitung total akrual yaitu :

a. Mengihtung total akrual

$$TA_{it} = N_{it} - CFO_{it} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

N_{it} = Laba bersih (*Net Income*) perusahaan i pada tahun t

CFO_{it} = Kas dari operasi (*cash flow operation*) perusahaan i pada tahun t .

Total akrual tersebut dapat dipergunakan sebagai perhitungan untuk mencari proksi *discretionary accrual* yang merupakan ukuran manajemen laba.

Total *accrual* sebuah perusahaan dapat dipisahkan menjadi *non-discretionary accrual* dan *discretionary accrual*. Model Jones (1991) memisahkan tingkat akrual *discretionary* dan *non-discretionary*. Dalam penelitiannya Jones menggunakan aktiva tetap dan perubahan pendapatan untuk mengontrol perubahan *non-discretionary accrual* karena perubahan kondisi yang terjadi. Pendapatan digunakan sebagai kontrol terhadap lingkungan perusahaan karena pendapatan merupakan ukuran objektif dari operasi perusahaan sebelum manipulasi manajer Jones (1991). Aktiva tetap digunakan karena berkaitan dengan biaya depresiasi yang *non-discretionary*. Kemudian oleh Jones model tersebut dibagi dengan total aktiva tahun sebelumnya ($Ait-1$) dengan tujuan untuk menghilangkan pengaruh heteroskedastisitas.

Penelitian ini menggunakan model Jones yang telah dimodifikasi oleh Dechow, Sloan dan Sweeney (1995) yaitu bahwa perubahan pendapatan disesuaikan dengan perubahan piutang karena dalam pendapatan atas penjualan sudah tentu ada yang berasal dari penjualan secara kredit. Pengurangan terhadap nilai piutang untuk menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima benar-benar merupakan pendapatan bersih.

Penelitian ini juga menggunakan model yang dikembangkan oleh Gill- de-Albornoz and Illueca (2005), Phillips et al. (2003), Kaznik (1999), and Jeter and Shivakumar (1999) yang memasukkan arus kas dari operasi (CFO) untuk

mengurangi pengaruh tingkat kinerja yang ekstrim, karena arus kas menunjukkan kesempatan untuk memperoleh laba besar.

Model modifikasi Jones untuk melakukan estimasi terhadap akrual tersebut adalah sebagai berikut :

$$TA_{it} / A_{it-1} = \alpha_1 (1 / A_{it-1}) + \beta_1 (\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} - \Delta REC_{it} / A_{it-1}) + \beta_2 (PPE_{it} / A_{it-1}) + \beta_3 (CFO_{it} / A_{it-1}) + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(2)$$

dimana :

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

A_{it-1} = Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1

ΔREV_{it} = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan pada tahun t-1.

ΔREC_{it} = piutang perusahaan i pada tahun t dikurang piutang tahun t-1.

PPE_{it} = Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t

ε_{it} = *Error term* perusahaan i pada tahun t

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

CFO_{it} = Arus kas operasi perusahaan i pada tahun t

Jadi, total akrual merupakan penjumlahan antara *non-discretionary accrual* dengan *discretionary accrual* dengan persamaan sebagai berikut :

$$TA_{it} = NDA_{it} + DA_{it} \dots\dots\dots(3)$$

dimana :

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

NDA_{it} = *Nondiscretionary accrual* perusahaan I pada tahun t

DA_{it} = *Discretionary accrual* pada perusahaan i pada tahun t

b. Menghitung tingkat akrual yang normal

$$NDA_{it} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \beta_1 (\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} - \Delta REC_{it}/A_{it-1}) + \beta_2 (PPE_{it} / A_{it-1}) + \beta_3 (CFO_{it} / A_{it-1}) \dots\dots\dots(4)$$

Oleh karena itu jika dilihat dari persamaan (3) dan (4) maka estimasi *discretionary accrual* adalah *eit* (*error term*). Jadi proksi *discretionary accrual* adalah :

$$DA_{it} = TA_{it} / A_{it-1} - [\alpha_1 (1/A_{it-1}) + \beta_1 (\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} - \Delta REC_{it}/A_{it-1}) + \beta_2 (PPE_{it} / A_{it-1}) + \beta_3 (CFO_{it} / A_{it-1}) \dots\dots\dots(5)$$

3.2 Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008 – 2010. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan suatu metode pengambilan sampel *non* probabilita yang disesuaikan dengan kriteria tertentu. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan sampel penelitian ini adalah :

1. Menerbitkan data laporan keuangan tahunan yang lengkap selama periode pengamatan 2007-2010.

Pemilihan rentang waktu bertujuan agar penelitian hanya berfokus pada tahun sekitar perubahan UU PPh Tahun 2008 sehingga hasil yang diperoleh akan maksimal.

2. Perusahaan manufaktur harus memperoleh laba selama periode pengamatan 2007-2010.

Perusahaan harus memperoleh laba karena laba yang direkayasa oleh manajemen merupakan penghasilan kena pajak. Sedangkan perusahaan yang rugi akan mengkreditkan pajaknya ke tahun-tahun berikutnya. Selain itu perusahaan tidak kena kompensasi pajak akibat rugi tahun sebelumnya yang menutupi laba pada tahun bersanngkutan.

3. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian selama periode pengamatan tahun 2007 – 2010.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan Wajib Pajak Badan untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2007-2010. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh, dikumpulkan, dan diolah oleh pihak lain). Sumber data dari penelitian ini adalah *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) 2011 dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit tahun 2007-2010.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen ataupun data-data yang diperlukan.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam pengelolaan data peneliti menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak statistik (*statistic software*) yang dikenal dengan SPSS. Sedangkan teknik analisis yang digunakan meliputi : uji statistik deskriptif, uji multikolinearitas, analisis regresi berganda, uji *kolmogorov smirnov* dan uji beda *paired sample t-test*.

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran variabel-variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean, nilai range, nilai standar deviasi, dari data *discretionary accrual* untuk tahun pengamatan 2008-2010.

3.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini merupakan bentuk pengujian untuk asumsi dalam analisis regresi berganda. Asumsi multikolinearitas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Gejala multikolinearitas adalah gejala korelasi antarvariabel independen. Gejala ini ditunjukkan dengan korelasi yang signifikan antarvariabel independen. Uji multikolineritas diketahui dari nilai VIF untuk masing *predictor*. Bila nilai VIF sekitar 1, maka dapat disimpulkan bahwa model tidak terkena persoalan multikolinier.

3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui koefisien masing-masing *predictor*. Dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan seberapa besar pengaruh masing-masing *predictor* dalam proksi yang digunakan, yang dilambangkan masing-masing dengan α_1 , β_1 , β_2 , dan β_3 .

3.5.4 Uji Normalitas

Tujuan dari uji ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel bebas/variabel terikat kedua-duanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2005). Model regresi yang memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal dikatakan model regresi yang baik. Normalitas suatu data dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal plot, melihat grafik histogram dari residualnya, atau menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dasar pengambilan keputusan untuk analisis grafik normal plot adalah sebagai berikut (Ghozali, 2005):

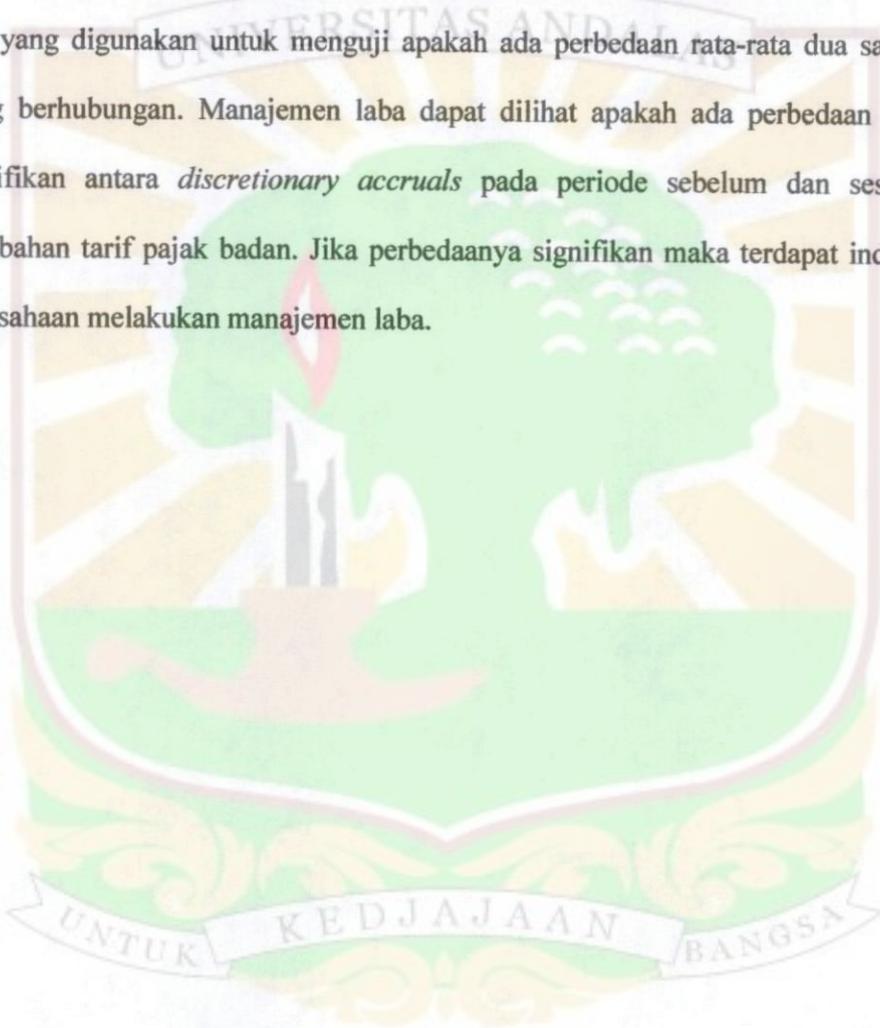
- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis histogram, menuju pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal atau garis histograf, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan untuk uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirov (K-S) adalah apabila nilai signifikansi Kolmogorov-Smirov

lebih besar dari 0,05, maka data residual terdistribusi normal. Sebaliknya signifikansi Kolmogorov-Smirnov lebih kecil dari 0,05 maka data residual terdistribusi secara tidak normal (Ghozali, 2005).

3.5.5 Uji Beda T-Test

Uji beda t-test yang digunakan dalam penelitian ini adalah paired sample t-test yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan. Manajemen laba dapat dilihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara *discretionary accruals* pada periode sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak badan. Jika perbedaannya signifikan maka terdapat indikasi perusahaan melakukan manajemen laba.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan 2007-2010. Hal ini dikarenakan perusahaan manufaktur rentan melakukan rekayasa laba, misalnya: pemilihan metode persediaan memakai LIFO untuk meningkatkan beban pada akhir tahun sehingga akan mengurangi laba. Sampel diseleksi dengan metode *purposive sampling*. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD), terdapat 178 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2007-2010, dan data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode pengamatan 2007-2010	178
2.	Perusahaan manufaktur yang mengalami rugi atau memiliki arus kas operasi negatif	(62)
3.	Perusahaan manufaktur yang mengalami delisting selama periode pengamatan	(29)
4.	Perusahaan manufaktur yang data laporan keuangan tidak lengkap	(63)
	Jumlah sampel akhir	24

Sumber : Data sekunder yang telah diolah

Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia, *Indonesian Capital Market Directory*, dan BEI5000.com serta idx.co.id. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang

tetap listing dari tahun 2007 sampai tahun 2010. Dalam periode pengamatan ini terdapat dua kali penurunan tarif PPh Wajib Pajak Badan yaitu:

1. Penurunan tarif menjadi tarif tunggal 28% yang terjadi pada tahun 2008 dan berlaku pada tahun fiskal 2009.
2. Penurunan tarif menjadi tarif tunggal 25% yang terjadi pada tahun 2009 dan berlaku pada tahun fiskal 2010.

Untuk analisis dalam penelitian ini menggunakan Model Jones yang dimodifikasi oleh Dechow untuk menghitung total akrual. Dalam model ini membutuhkan komponen laporan keuangan berupa komponen neraca meliputi total aktiva, piutang, dan aktiva tetap, komponen laba rugi meliputi *net income* dan pendapatan penjualan, sedangkan laporan arus kas dibutuhkan untuk mengetahui jumlah kas bersih dari kegiatan operasi perusahaan.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Hasil Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran terhadap *discretionary accrual*. Tabel 4.2 berikut ini menyajikan statistik deskriptif untuk pendekatan *discretionary accrual*.

Tabel 4.2

Descriptive Statistic

	N	Minimum	Maximun	Mean	Std. Deviation
DA 2008	24	-0.02	0.31	0.1302	0.09208
DA 2009	24	-0.13	0.08	0.1311	0.05186
DA 2010	24	0.04	0.55	0.0032	0.13624
Valid N (listwise)	24				

Sumber : data diolah

Dari tabel statistik deskriptif dapat diketahui bahwa variabel DA memiliki nilai minimum pada tahun 2008, 2009, dan 2010 sebesar -0,02 , -0,13 , dan 0,04. Sedangkan nilai maksimum yang didapat sebesar 0,31 , 0,08 , dan 0,55. Rata-rata nilai DA pada tahun 2008 sebesar 0,1302 dengan standar deviasi 0,09208 , ini lebih kecil dari rata-rata DA tahun 2009 sebesar 0,1311 dengan standar deviasi 0,05186. Sedangkan rata-rata DA tahun 2010 jauh lebih kecil dari dua tahun sebelumnya sebesar 0,0032 dengan standar deviasi 0,13624. Nilai *discretionary accrual* yang bernilai positif dan negatif menunjukkan bahwa terdapat DA yang menaikkan laba (*income increasing*) dan menurunkan laba (*income decreasing*). Rata-rata *discretionary accrual* pada tahun 2008 menunjukkan nilai yang lebih rendah daripada tahun 2009, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi usaha penurunan laba pada tahun 2008 di mana tarif pajaknya lebih tinggi sebelum adanya penurunan tarif. Berbanding terbalik pada tahun 2009 dan 2010, dimana rata-rata *discretionary accrual* tahun 2009 lebih tinggi dari rata-rata *discretionary accrual* tahun 2010, hal ini menunjukkan bahwa terjadi usaha penurunan laba pada tahun 2009 di mana tarif pajaknya lebih tinggi sebelum adanya penurunan tarif.

4.2.2 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Analisis ini menggunakan analisis regresi linier dengan syarat model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian terhadap normalitas dilakukan dengan

menggunakan metode *one sample kolmogorov smirnov (1-Sample K-S)*, dalam pengujian ini terlebih dahulu ditentukan hipotesis sebagai berikut :

H0 : data residual berdistribusi normal

HA: data residual berdistribusi tidak normal

Pada pengujian ini nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* jika lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi secara normal, tetapi jika nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa variabel yang diuji tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2009).

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas

	DA 2008	DA 2009	DA 2010
N	24	24	24
Kolmogorov-Smirnov	0.438	0.585	0.372
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.991	0.883	0.999

Sumber : data diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* untuk periode tahun 2008, 2009, dan 2010 adalah 0,438 , 0,585 , dan 0,372 dan tingkat signifikan pada 0,991 , 0,883 , dan 0,999 karena Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka HA ditolak yang artinya data terdistribusi secara normal.

4.2.3 Uji Hipotesis

4.2.3.1. Periode Sebelum Penurunan Tarif 28% Pada Tahun 2008

Sebelum dapat menemukan nilai *discretionary accrual*, pertama-tama menghitung nilai dari total akrual yang akan menjadi variabel dependen. Kemudian dilakukan regresi untuk dapat menemukan nilai dari estimasi *nondiscretionary accrual*. Estimasi *non-discretionary accrual* menggunakan

model Jones yang telah dimodifikasi oleh Dechow et. al (1995). Variabel arus kas operasi saat ini (*Current Operating Cash Flow*)/OCF dimasukkan untuk mengontrol tingkat kinerja ekstrim (Dechow, 1995). Maka model persamaan regresi berganda yang digunakan untuk mengestimasi *non-discretionary accrual* sebagai berikut :

$$NDA_{it} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \beta_1 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} - \Delta REC_{it} / A_{it-1} \right) + \beta_2 (PPE_{it} / A_{it-1}) + \beta_3 (CFO_{it} / A_{it-1})$$

Sebelum dilakukan regresi, maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah nilai yang dibutuhkan untuk dapat mengetahui estimasi nilai *non-discretionary accrual* ini telah memenuhi syarat dan dapat dilakukan regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas menyajikan data sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
$1/A_{it-1}$	0.833	1.2
$\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} - \Delta REC_{it} / A_{it-1}$	0.901	1.1
PPE_{it} / A_{it-1}	0.867	1.2
CFO_{it} / A_{it-1}	0.876	1.1

Sumber : data diolah

Hasil uji multikolinearitas diketahui dari nilai VIF masing-masing prediktor. Bila nilai VIF sekitar satu, maka dapat disimpulkan bahwa model tidak terkena persoalan multikolonier. Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF sekitar satu, yang berarti variabel independen pada perhitungan DA tahun 2008 terbebas dari gejala multikolinearitas. Dengan demikian analisis regresi berganda

pada perhitungan DA tahun 2008 dapat dilakukan. Berikut data yang menyajikan hasil analisis berganda pada tahun 2008 :

Tabel 4.5

Estimasi *non-discretionary accruals* dengan model Jones yang dimodifikasi dengan variabel kontrol CFO

Model	Standardized Coefficients
	Beta
$1 / A_{it-1}$	-0.158
$\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} - \Delta REC_{it} / A_{it-1}$	0.142
PPE_{it} / A_{it-1}	-0.336
CFO_{it} / A_{it-1}	-0.442

Sumber : data diolah

Dari hasil regresi, diperoleh koefisien yang digunakan untuk mencari nilai *non-discretionary accrual* yang nantinya akan digunakan untuk mencari nilai *discretionary accrual*. Karena pada rumus Jones yang telah dimodifikasi tidak terdapat nilai konstan, maka nilai koefisien yang digunakan adalah Beta dari *standardized coefficients*. Oleh karena itu model Jones yang digunakan untuk mengestimasi nilai akrual normal pada perhitungan DA tahun 2008 dapat ditulis sebagai berikut :

$$NDA_{it} = -0,158(1 / A_{it-1}) + 0,142\left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} - \Delta REC_{it} / A_{it-1}\right) + -0,336(PPE_{it} / A_{it-1}) + -0,442(CFO_{it} / A_{it-1})$$

Hasil perhitungan dari persamaan diatas diperoleh nilai *non-discretionary accrual*, kemudian total akrual dikurangi dengan *non-discretionary accrual* untuk memperoleh nilai *discretionary accrual* sebelum penurunan tarif pajak badan yang disajikan dalam Lampiran 4.

4.2.3.2 Periode Sesudah Penurunan Tarif 28% atau Sebelum Penurunan Tarif 25% Pada Tahun 2009

Sebelum dapat menemukan nilai *discretionary accrual*, pertama-tama menghitung nilai dari total akrual yang akan menjadi variabel dependen. Kemudian dilakukan regresi untuk dapat menemukan nilai dari estimasi *nondiscretionary accrual*. Estimasi *non-discretionary accrual* menggunakan model Jones yang telah dimodifikasi oleh Dechow et. al (1995). Variabel arus kas operasi saat ini (*Current Operating Cash Flow*)/OCF dimasukkan untuk mengontrol tingkat kinerja ekstrim (Dechow, 1995). Maka model persamaan regresi berganda yang digunakan untuk mengestimasi *non-discretionary accrual* sebagai berikut :

$$NDA_{it} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \beta_1 (\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} - \Delta REC_{it}/A_{it-1}) + \beta_2 (PPE_{it} / A_{it-1}) + \beta_3 (CFO_{it} / A_{it-1})$$

Sebelum dilakukan regresi, maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah nilai yang dibutuhkan untuk dapat mengetahui estimasi nilai *non-discretionary accrual* ini telah memenuhi syarat dan dapat dilakukan regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas menyajikan data sebagai berikut :

Tabel 4.6

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
$1 / A_{it-1}$	0.745	1.3
$\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} - \Delta REC_{it} / A_{it-1}$	0.732	1.4
PPE_{it} / A_{it-1}	0.798	1.2
CFO_{it} / A_{it-1}	0.686	1.4

Sumber : data diolah

Hasil uji multikolinearitas diketahui dari nilai VIF masing-masing predictor. Bila nilai VIF sekitar satu, maka dapat disimpulkan bahwa model tidak terkena persoalan multikolonier. Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF sekitar satu, yang berarti variabel independen pada perhitungan DA tahun 2009 terbebas dari gejala multikolinearitas. Dengan demikian analisis regresi berganda pada perhitungan DA tahun 2009 dapat dilakukan. Berikut data yang menyajikan hasil analisis berganda pada tahun 2009 :

Tabel 4.7

Estimasi *non-discretionary accruals* dengan model Jones yang dimodifikasi
dengan variabel kontrol CFO

Model	Standardized Coefficients
	Beta
$1 / A_{it-1}$	0.164
$\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} - \Delta REC_{it} / A_{it-1}$	0.189
PPE_{it} / A_{it-1}	-0.009
CFO_{it} / A_{it-1}	-0.363

Sumber : data diolah

Dari hasil regresi, diperoleh koefisien yang digunakan untuk mencari nilai *non-discretionary accrual* yang nantinya akan digunakan untuk mencari nilai

discretionary accrual. Karena pada rumus Jones yang telah dimodifikasi tidak terdapat nilai konstan, maka nilai koefisien yang digunakan adalah Beta dari *standardized coefficients*. Oleh karena itu model Jones yang digunakan untuk mengestimasi nilai akrual normal pada perhitungan DA tahun 2009 dapat ditulis sebagai berikut :

$$NDA_{it} = 0,164(1/A_{it-1}) + 0,189(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} - \Delta REC_{it}/A_{it-1}) + -0,009(PPE_{it} / A_{it-1}) + -0,363(CFO_{it} / A_{it-1})$$

Hasil perhitungan dari persamaan diatas diperoleh nilai *non-discretionary accrual*, kemudian total akrual dikurangi dengan *non-discretionary accrual* untuk memperoleh nilai *discretionary accrual* sebelum penurunan tarif pajak badan yang disajikan dalam Lampiran 5.

4.2.3.3 Periode Sesudah Penurunan Tarif 25% Pada Tahun 2010

Sebelum dapat menemukan nilai *discretionary accrual*, pertama-tama menghitung nilai dari total akrual yang akan menjadi variabel dependen. Kemudian dilakukan regresi untuk dapat menemukan nilai dari estimasi *nondiscretionary accrual*. Estimasi *non-discretionary accrual* menggunakan model Jones yang telah dimodifikasi oleh Dechow et. al (1995). Variabel arus kas operasi saat ini (*Current Operating Cash Flow*)/OCF dimasukkan untuk mengontrol tingkat kinerja ekstrim (Dechow, 1995). Maka model persamaan regresi berganda yang digunakan untuk mengestimasi *non-discretionary accrual* sebagai berikut :

$$NDA_{it} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \beta_1(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} - \Delta REC_{it}/A_{it-1}) + \beta_2(PPE_{it} / A_{it-1}) + \beta_3(CFO_{it} / A_{it-1})$$

Sebelum dilakukan regresi, maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah nilai yang dibutuhkan untuk dapat mengetahui estimasi nilai *non-discretionary accrual* ini telah memenuhi syarat dan dapat dilakukan regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas menyajikan data sebagai berikut :

Tabel 4.8

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
$1/A_{it-1}$	0.834	1.2
$\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{A_{it-1}}$	0.959	1.0
PPE_{it} / A_{it-1}	0.827	1.2
CFO_{it} / A_{it-1}	0.978	1.0

Sumber : data diolah

Hasil uji multikolinearitas diketahui dari nilai VIF masing-masing predictor. Bila nilai VIF sekitar satu, maka dapat disimpulkan bahwa model tidak terkena persoalan multikolonier. Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF sekitar satu, yang berarti variabel independen pada perhitungan DA tahun 2010 terbebas dari gejala multikolinearitas. Dengan demikian analisis regresi berganda pada perhitungan DA tahun 2010 dapat dilakukan. Berikut data yang menyajikan hasil analisis berganda pada tahun 2010 :

Tabel 4.9

Estimasi *non-discretionary accruals* dengan model Jones yang dimodifikasi
dengan variabel kontrol CFO

Model	Standardized Coefficients
	Beta
$1 / A_{it-1}$	-0.454
$\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} - \Delta REC_{it} / A_{it-1}$	-0.291
PPE_{it} / A_{it-1}	-0.479
CFO_{it} / A_{it-1}	-0.401

Sumber : data diolah

Dari hasil regresi, diperoleh koefisien yang digunakan untuk mencari nilai *non-discretionary accrual* yang nantinya akan digunakan untuk mencari nilai *discretionary accrual*. Karena pada rumus Jones yang telah dimodifikasi tidak terdapat nilai konstan, maka nilai koefisien yang digunakan adalah Beta dari *standardized coefficients*. Oleh karena itu model Jones yang digunakan untuk mengestimasi nilai akrual normal pada perhitungan DA tahun 2010 dapat ditulis sebagai berikut :

$$NDA_{it} = -0,454(1 / A_{it-1}) + -0,291(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} - \Delta REC_{it} / A_{it-1}) + -0,479(PPE_{it} / A_{it-1}) + -0,401(CFO_{it} / A_{it-1})$$

Hasil perhitungan dari persamaan diatas diperoleh nilai *non-discretionary accrual*, kemudian total akrual dikurangi dengan *non-discretionary accrual* untuk memperoleh nilai *discretionary accrual* sebelum penurunan tarif pajak badan yang disajikan dalam Lampiran 6.

4.2.4 Uji Beda *T-Test Discretionary Accrual*

4.2.4.1 Perbedaan *Discretionary Accrual* Tahun 2008 dengan Tahun 2009

Setelah melakukan pengujian regresi untuk menentukan nilai estimasi *non-discretionary accruals*, maka akan didapat nilai *discretionary accrual* pada tahun 2008 dan tahun 2009. Sehingga dapat dilakukan uji beda *t-test* untuk mengetahui perbedaan tingkat *discretionary accrual* antara tahun 2008 dengan tahun 2009 tersebut. Hipotesis awal yang diajukan menyatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat *discretionary accrual* antara sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak Badan menjadi 28%, dimana perusahaan yang melakukan manajemen laba diindikasikan tingkat *discretionary accrual*nya lebih tinggi daripada saat sesudah penurunan tarif pajak tersebut.

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis tersebut, maka dilakukan uji beda *t-test* antara tingkat *discretionary accrual* antara sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak 2008. Jika terdapat perbedaan yang signifikan antara tahun 2008 dengan tahun 2009 pada 24 perusahaan yang telah dijadikan sampel pengujian, maka perusahaan-perusahaan tersebut melakukan manajemen laba sehubungan dengan adanya penurunan tarif pajak 2008. Perusahaan tidak melakukan manajemen laba jika nilai total akrual sama dengan nilai *non-discretionary accrual*, atau nilai *discretionary accrual* sama dengan nol. Karena hal itulah, maka peneliti menguji nilai *discretionary accrual* antara sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak. Alat uji yang digunakan adalah uji beda *paired sample t-test*. Tabel 4.10 di bawah ini menunjukkan hasil dari uji beda tersebut :

Tabel 4.10

Hasil Uji Beda Rata-Rata *Discretionary Accrual*

	<i>Paired Differences</i>	t	Sig (2-tailed)
	Mean		
Pair 1 DA 2008 - DA 2009	-0.15090	-0.718	0.733

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel 4.10 hasil yang diperoleh dari uji beda rata-rata *discretionary accrual* menunjukkan bahwa secara statistik terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara periode sebelum penurunan tarif pajak Badan 2008 dengan sesudah penurunan tarif pajak Badan 2008 yaitu dengan nilai signifikansi 2-tailed sebesar 0,733 pada taraf signifikansi 0,05. Nilai t yang disajikan untuk uji beda rata-rata berpasangan sebesar -0,718 dengan tingkat signifikansi 2-tailed 0,733 yang berarti nilai t tidak signifikan karena p-value 0,733 jauh lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_A diterima yang artinya hasil uji yang dilakukan tidak mendukung hipotesis awal yang diajukan.

4.2.4.2 Perbedaan *Discretionary Accrual* Tahun 2009 dengan Tahun 2010

Setelah melakukan pengujian regresi untuk menentukan nilai estimasi *non-discretionary accruals*, maka akan didapat nilai *discretionary accrual* pada tahun 2009 dan tahun 2010. Sehingga dapat dilakukan uji beda *t-test* untuk mengetahui perbedaan tingkat *discretionary accrual* antara tahun 2009 dengan tahun 2010 tersebut. Hipotesis awal yang diajukan menyatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat *discretionary accrual* antara sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak badan menjadi 25%, dimana perusahaan yang melakukan manajemen laba

diindikasikan tingkat *discretionary accrual*nya lebih tinggi daripada saat sesudah penurunan tarif pajak tersebut.

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis tersebut, maka dilakukan uji beda *t-test* antara tingkat *discretionary accrual* antara sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak 2009. Jika terdapat perbedaan yang signifikan antara tahun 2009 dengan tahun 2010 pada 24 perusahaan yang telah dijadikan sampel pengujian, maka perusahaan-perusahaan tersebut melakukan manajemen laba sehubungan dengan adanya penurunan tarif pajak tahun 2009. Perusahaan tidak melakukan manajemen laba jika nilai total akrual sama dengan nilai *non-discretionary accrual*, atau nilai *discretionary accrual* sama dengan nol. Karena hal itulah, maka peneliti menguji nilai *discretionary accrual* antara sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak. Alat uji yang digunakan adalah uji beda *paired sample t-test*. Tabel 4.11 di bawah ini menunjukkan hasil dari uji beda tersebut :

Tabel 4.11

Hasil Uji Beda Rata-Rata *Discretionary Accrual*

	<i>Paired Differences</i>	t	Sig (2-tailed)
	Mean		
Pair 1 DA 2009 - DA 2010	1.32834	1.320	0.000

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel 4.11 hasil yang diperoleh dari uji beda rata-rata *discretionary accrual* menunjukkan bahwa secara statistik terlihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara periode sebelum penurunan tarif pajak Badan 2009 dengan sesudah penurunan tarif pajak Badan 2009 yaitu dengan nilai signifikansi *2-tailed* sebesar 0,000 pada taraf signifikansi 0,05. Nilai t yang disajikan untuk uji beda rata-rata berpasangan sebesar 1,328 dengan tingkat

signifikansi 2-tailed 0,000 yang berarti nilai t signifikan karena p -value 0,000 jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa H_0 diterima dan H_A ditolak yang artinya hasil uji yang dilakukan mendukung hipotesis awal yang diajukan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Penurunan Tarif PPh Badan Menjadi 28%

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan *uji sample t-test* dengan analisis *compare means* untuk dapat mengetahui perbedaan tingkat *discretionary accrual* pada tahun sebelum penurunan tarif pajak yaitu tahun 2008 yang dibandingkan dengan tingkat *discretionary accrual* sesudah perubahan tarif pajak yaitu tahun 2009 dan perbedaan tingkat *discretionary accrual* pada tahun sebelum penurunan tarif pajak yaitu tahun 2009 yang dibandingkan dengan tingkat *discretionary accrual* sesudah perubahan tarif pajak yaitu tahun 2010.

Rata-rata *discretionary accrual* pada tahun 2008 atau pada saat sebelum penurunan tarif pajak menjadi 28% yaitu sebesar 0,1302, di mana nilai rata-rata DA tahun 2008 ini lebih rendah daripada tahun 2009 yaitu sebesar 0,1311. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi usaha penurunan laba pada tahun 2008 di mana tarif pajaknya lebih tinggi sebelum adanya penurunan tarif. Tingkat signifikansi 2-tailed yang diperoleh menunjukkan probabilitas tingkat signifikansi sebesar 0,733. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa secara absolut, akrual tahun 2008 lebih rendah, dan secara statistik tidak ada perbedaan secara signifikan, hal ini menandakan manajemen tidak menggunakan akrual untuk menghemat pajak. Hipotesis awal yang menyatakan bahwa tingkat *discretionary accrual* sesudah

penurunan tarif pajak penghasilan badan 2008 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan sebelum penurunan tarif pajak penghasilan badan 2008 tidak dapat diterima.

Hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa adanya perubahan tarif PPh Badan yang lebih kecil tidak direspon oleh perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Oleh karena itu data yang dihasilkan tidak mendukung hipotesis awal ($H0_1$). Pada periode ini perusahaan tidak melakukan penghematan laba pada tahun sesudah penurunan tarif pajak, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa perusahaan tidak menunda pengakuan pendapatan tahun 2008 dan menggeser pendapatan tersebut ke tahun 2009 dalam merespon Undang-undang Perpajakan PPh Badan 2008. Dari hasil yang diperoleh tersebut membuktikan bahwa manajemen tidak menggunakan akrual untuk menghemat pajak, selain itu manajemen tidak melakukan tindakan *opportunistic* dalam merespon penurunan tarif pajak penghasilan badan 2008.

Pada periode ini perusahaan tidak terbukti melakukan manajemen laba setelah penurunan tarif pajak penghasilan badan 2008 menjadi tarif tunggal 28% dimungkinkan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor pertama yaitu manajemen tidak menggunakan akrual sebagai usaha untuk melakukan penghematan pajak. Sedangkan faktor kedua yaitu kemungkinan manajemen melihat tarif yang dikenakan pada tahun 2009 yaitu 28% tidak lebih kecil daripada tarif tahun 2010 yaitu 25%, sehingga ada kemungkinan perusahaan melakukan penghematan pajak melalui manajemen laba untuk tarif pada tahun 2010 tersebut.

Hasil yang konsisten juga ditunjukkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan Zulaikha (2003) yang melakukan penelitian mengenai adanya perilaku *earning management* menggunakan pendekatan *discretionary accrual*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perubahan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000 tidak direspon oleh Wajib Pajak Badan untuk melakukan *earning management* dengan tujuan untuk meminimumkan beban pajak penghasilan perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya perbedaan *discretionary accrual* pada tahun 2000 dan 2001, dan hal ini diinterpretasikan bahwa perusahaan tidak menunda pengakuan pendapatan tahun 2000 dan menggesernya ke tahun 2001 dalam merespon Undang-undang Perpajakan 2000 tersebut.

Hasil penelitian Hidayati dan Zulaikha (2003) konsisten pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan Na'im (2000) yang menguji apakah terdapat perilaku manajemen laba di perusahaan manufaktur pada saat penurunan tarif pajak tahun 1994. Hasil penelitiannya tidak membuktikan adanya perilaku perusahaan untuk menurunkan laba setelah penurunan tarif pajak tahun 1994 tersebut.

4.3.2 Penurunan Tarif PPh Badan Menjadi 25%

Berbanding terbalik dengan periode penurunan tarif pajak 25% yang diberlakukan pada tahun fiskal 2010. Dimana rata-rata *discretionary accrual* pada tahun 2009 atau pada saat sebelum penurunan tarif pajak menjadi 25% yaitu sebesar 0,1311, dan nilai rata-rata DA tahun 2009 ini lebih tinggi daripada tahun 2010 yaitu sebesar 0,0032. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi usaha penurunan laba pada tahun 2009 di mana tarif pajaknya lebih tinggi sebelum adanya

penurunan tarif. Tingkat signifikansi *2-tailed* yang diperoleh menunjukkan probabilitas tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa secara absolut, akrual tahun 2009 lebih tinggi, dan secara statistik ada perbedaan secara signifikan, hal ini menandakan manajemen menggunakan akrual untuk menghemat pajak. Hipotesis awal yang menyatakan bahwa tingkat *discretionary accrual* sesudah penurunan tarif pajak penghasilan badan tahun 2010 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan sebelum penurunan tarif pajak penghasilan badan tahun 2009 dapat diterima. Hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa adanya perubahan tarif PPh Badan yang lebih kecil direspon oleh perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Oleh karena itu data yang dihasilkan mendukung hipotesis awal ($H0_2$). Pada periode ini perusahaan melakukan penghematan laba pada tahun sesudah penurunan tarif pajak, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa perusahaan menunda pengakuan pendapatan tahun 2009 dan menggeser pendapatan tersebut ke tahun 2010 dalam merespon Undang-undang Perpajakan tarif PPh Badan 2008. Dari hasil yang diperoleh tersebut membuktikan bahwa manajemen menggunakan akrual untuk menghemat pajak, selain itu manajemen melakukan tindakan opportunistik dalam merespon penurunan tarif pajak penghasilan badan 2008.

Pada periode ini perusahaan terbukti melakukan manajemen laba setelah penurunan tarif pajak penghasilan badan tahun 2009 dimungkinkan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu tingkat penurunan tarif pada periode ini lebih besar jika dibandingkan dengan penurunan tarif pajak sebelumnya, dimana pada penurunan tarif 28% pada hasil penelitian ini manajemen tidak menggunakan *discretionary accrual* untuk menghemat pajak.

Hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan Wulandari, dkk (2004) yang meneliti tentang adanya indikasi manajemen laba menjelang Undang-Undang Perpajakan tahun 2000. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa praktik manajemen laba masih tetap dilakukan dengan adanya perubahan Undang-Undang Perpajakan 2000. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat *discretionary accrual* yang lebih tinggi setelah perubahan Undang-undang dibandingkan sebelum perubahan Undang-undang. Dengan dibuktikannya penelitian ini, maka menunjukkan bahwa pihak manajemen perusahaan cenderung untuk mentransfer labanya pada periode setelah Undang-Undang Perpajakan, karena pada periode ini tarif pajak penghasilannya telah menurun sehingga perusahaan dapat memperoleh penghematan pajak.

Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Yamashita dan Otogawa (2007) yang meneliti tentang pengaruh publikasi perubahan Undang-undang tarif pajak penghasilan badan terhadap perusahaan Jepang. Dalam penelitiannya ini membuktikan terdapat signifikansi *negative discretionary accrual* untuk tahun sebelum penurunan tarif pajak. Hal ini membuktikan bahwa manager perusahaan menunda penghasilan dalam menanggapi perubahan Undang-Undang Perpajakan yang digunakan untuk meminimalkan biaya pajak penghasilan badan.

yang rahasia oleh sebagian kalangan. Sehingga ada beberapa laporan keuangan yang tidak bisa digunakan dalam penelitian ini.

2. Faktor yang diteliti hanya manajemen laba pada industri manufaktur saja sehingga hasil yang didapat tidak dapat digeneralisir pada industri jenis lainnya.

5.2.2 Saran Penelitian

1. Untuk peneliti selanjutnya agar bisa mendapatkan komponen laporan keuangan yang lebih lengkap, atau bisa langsung mendapatkannya di lembaga resmi Bursa Efek Indonesia.
2. Pengembangan penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas sampel penelitian tidak hanya pada industri manufaktur saja tetapi pada industri jasa dan retail atau dapat dikelompokkan berdasarkan klasifikasi industri.
3. Pemerintah seharusnya menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi perusahaan yang dengan sengaja melakukan manajemen laba untuk menghemat pajak.

Daftar Referensi

- Abimanyu, A. (2009). *Tantangan kebijakan fiskal 1998-2009: Dari krisis asia ke krisis global. In A. Abimanyu, & A. Megantara, Era baru kebijakan fiskal* (2nd ed.). Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Balachandran, Balashingham et al. (2007). Earnings Management in Response to the Corporate Tax Law Changes Evidence from Australia. 2007 *Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand Conference*, No. 142.
- Belkaoui, & Riahi, A. (2000). *Teori Akuntansi* (Marwata, 1st Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Chariri, A, & Imam, G. (2007). *Teori Akuntansi* (1st Ed). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Deangelo, L. E. (1986). Accounting Number as Valuation Substitutes: A Study of Management Buyouts of Public Stockholders. *The Accounting Review*, (59)5, 400-420.
- Dechow, P. M., R. G. Sloan, & A. P. Sweeney. (1995). Detecting Earnings Management. *The Accounting Review*, 70(2), 193-225.
- Dhaliwal, D. S., M. Frankel, & R. Trezervant. (1994). The Taxable and Book Income Motivation for LIFO Layer Liquidation. *Journal of Accounting Research*, (32)2, 278-287.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (4th Ed.). Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gilldealbornoz, G. D. B, & Illueca, M. (2005). Earnings management under priceregulation: Empirical evidence from the Spanish electricity industry. *Energy Economics*, (27)9, 279-304.
- Guenther, D. A. (1994). Earnings Manangement in Response to Corporate Tax Rate Changes: Evidence from the 1986 Tax Reform Act. *The Accounting Review*, 69(1), 230-243.
- Gumanti, T. A. (2000). Earning Management: Suatu Telaah Pustaka. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, (4)2, 104-115.
- Healy, P. (1985). The Effect of of Bonus Schemes on Accounting Decisions. *Journal of Accounting and Economics*. (pp 85–107).
- Hidayati, Munfi'ah, S, & Zulaikha. (2003). Analisis Perilaku *Earning Management* : Motivasi Minimalisasi *Income Tax*. *Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya*. (pp. 526-537).
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta.: Salemba Empat.
- Jensen, M, & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. (pp 305-360).
- Jeter, D. C, & L. Shivakumar. (1999). Cross Sectional Estimation of AbnormalAccruals Using Quarterly and Annual Data. *Accounting and Business Research*, (29)3, 299-319.
- Jones, J. J. (1991). The Effects of Foreign Trade Regulation on Accounting Choises. *Journal of Accounting Research*, 29(2), 193-228.

- Kaznik, R. (1999). On the Association Between Voluntary Disclosure and Earnings Management. *Journal of Accounting Research*, (37)4, 57-82.
- Maydew, E. L. (1997). Tax-induced Earnings Management by Firms with Net Operating Losses. *Journal of Accounting Research*, (35)1, 83-96.
- Nasution, D. (2009). *Substansi Perubahan UU Perpajakan 2008 dalam Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Phillips, J., M. Pincus, & S. O. Rego. (2003). Earnings Management: New Evidence Based on Deferred Tax Expense. *The Accounting Review*, (78)2, 491-521.
- PMK-238/PMK.03/2008. *Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri*.
- Pranoto, S. (2006). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang, dan Tingkat Kepemilikan terhadap Manajemen Laba*. (Unpublished master's thesis). Universitas Airlangga, Surabaya.
- Retrieved from www.bei5000.com
- Retrieved from www.idx.co.id
- Retrieved from www.pajak.go.id
- Salno, H. M, & Baridwan, Z. (2000). Analisis Perataan Penghasilan (*Income Smopthing*) : Faktor-faktor yang Mempengaruhi dan Kaitannya dengan Kinerja Saham Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, (3)1, 17-34.
- Scott, R. W. (2000). *Financial Accounting Theory* (2nd Ed.). Scarborough, Ontario, Canada: Prentice Hall Canada Inc.

- Sekaran, U. (2000). *Research Methods for Business : A Skill-Building Approach* (3th Ed.). New York, NY: John Wiley & Sons, Inc.
- Setiawati, L., & A. Naim. (2000). Manajemen Laba. *Journal Ekonomi dan Bisnis, Jakarta*. (pp. 159-176).
- Sook, S.Y. (1998). Cash from Operation and Earnings Management. *Working Paper*.
- Subagyo, & Oktavia. (2010). Manajemen Laba Sebagai Respon Atas Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIII, Jakarta*. (pp. 1-28).
- Sugiri, S. (1998). *Earning Management : Teori, Model, dan Bukti Empiris. Telaah Bisnis*. (pp 1-18).
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008. *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Wibisono, H. (2004). Pengaruh *Earning Management* Terhadap Kinerja di Seputar SEO. (Unpublished master's thesis). Universitas Diponegoro, Semarang.
- Wulandari, D., Kumalahadi, & Prasetyo, J. E. (2004). Indikasi Manajemen Laba Menjelang Undang-Undang Perpajakan 2000 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VII, Denpasar Bali*. (pp. 883 – 896).
- Yamashita, H, & Otagawa, K. (2007). Do Japanese Firms Manage Earnings in Response to Tax Rate Reduction in the Late 1990s?. MS-05-01.